



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 60 TAHUN 2020**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
RSUD dr. ACHMAD DARWIS
TAHUN 2021**

Sarilamak, Agustus 2020



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 60 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2018 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140).
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang

diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.

12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2021 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2021.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2021.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra PD

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2021 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2021 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2021.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 5 Agustus 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020 NOMOR 60



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2021 ini selesai disusun sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk penyusunan RKPD untuk peningkatan kinerja rumah sakit di tahun 2021.

Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu kepada arah kebijakan Kementerian Kesehatan dan arah kebijakan Pemerintah Daerah dan berpedoman kepada Rencana Strategis BLUD RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2016-2021.

Penerapan PPK-BLUD di RSUD dr. Achmad Darwis diharapkan dapat meningkatkan kinerja layanan sehingga belanja BLUD rumah sakit mengalami peningkatan yang signifikan. Subsidi Pemerintah ini mutlak diperlukan dalam rangka menunjang pelayanan dan pencapaian target kinerja pelayanan Rumah sakit.

Investasi yang direncanakan adalah pembangunan sarana gedung kamar operasi yaitu Interior/MOT Ruang Operasi dan Peralatan Kesehatan. Sedangkan subsidi operasional adalah untuk belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran serta subsidi bagi pasien kurang mampu. Apabila subsidi ini tidak dapat dipenuhi maka besar kemungkinan pelayanan kesehatan tidak berjalan optimal.

Akhirnya kami menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat salah dan janggal serta mohon kritik dan saran untuk penyempurnaan penyusunan Draft Rancangan Awal Rencana Kerja RSUD tahun 2021 ini.

Suliki, 5 Agustus 2020
Direktur



dr. Muryani Dhatri, M.Kes
NIP. 19760111 200604 2 012

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 60 TAHUN 2020
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2020
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan.....	I-12
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-15
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-15
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD dr. ACHMAD DARWIS TAHUN LALU.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD dr. Achmad Darwis.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis.....	II-11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD dr. Achmad Darwis.....	II-84
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-87
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-91
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RSUD dr. ACHMAD DARWIS.....	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021.....	III-2
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-9

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD dr. ACHMAD DARWIS.....	IV-1
4.1 Rencana Kinerja OPD tahun 2021 RSUD dr. Achmad Darwis.....	IV-1
4.2 Rencana Pendanaan RSUD dr. Achmad Darwis	IV-2
BAB V. PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

TABEL 1 :	Kalender Penyusunan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021.....	I-3
TABEL 2 :	Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2019.....	II-1
TABEL 3 : (T-C.29)	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis dan Perkiraan Maju Tahun 2021.....	II-4
TABEL 4 :	Kinerja Pelayanan Rawat Jalan RSUD dr. Achmad Darwis th 2015-2019.....	II-11
TABEL 5 :	Kinerja Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Achmad Darwis th 2015-2019.....	II-13
TABEL 6 :	Data Hari Rawatan di Rawat Inap RSUD dr. Achmad Darwis th 2015-2019.....	II-15
TABEL 7 :	Data Kunjungan Gawat Darurat dan Kamar Operasi th 2015-2019.....	II-16
TABEL 8 :	Kinerja Pelayanan Penunjang Medis RSUD dr. Achmad Darwis Th 2015-2019.....	II-17
TABEL 9 :	Evaluasi Kinerja Pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2019.....	II-18
TABEL 10 :	Capaian Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar..	II-31
TABEL 11 :	Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2019.....	II-34
TABEL 12 :	Capaian Kinerja Kualitas Layanan Rumah Sakit.....	II-67
TABEL 13 :	Hasil Survey dan Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	II-72
TABEL 14 :	Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja RS.....	II-74
TABEL 15 :	Kinerja Keuangan RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2017-2019.....	II-79
TABEL 16 : (T-C.30)	Pencapaian Indikator Kinerja Utama RSUD dr. Achmad Darwis.....	II-83
TABEL 17: (T-C.31):	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-88

TABEL 18 : (T-C.32)	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019.....	II-91
TABEL 19 :	Tujuan dan Sasaran RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021.....	III-2
TABEL 20 :	Rencana Pengembangan Produk Layanan RSUD dr. Achmad Darwis.....	III-7
TABEL 21:	Rencana Target Kinerja IKU OPD RSUD dr. Achmad Darwis.....	IV-1
TABEL 22 : (T-C.33)	Rencana Program dan Kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	IV-3
TABEL 23 :	Rencana Program dan Kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019).....	IV-5

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 :	Dokumentasi Pengadaan Obat- Obatan Rumah Sakit Tahun 2019.....	II-19
GAMBAR 2 :	Dokumentasi Pemeriksaan Pengadaan Obat- Obatan Tahun 2019.....	II-19
GAMBAR 3 :	Dokumentasi Diklat Survey Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2019.....	II-25
GAMBAR 4 :	Dokumentasi Diklat Akreditasi Snars Edisi 1 Tahun 2019.....	II-26
GAMBAR 5 :	Dokumentasi Diklat Bantuan Hidup Dasar (BHD) Tahun 2019.....	II-26
GAMBAR 6 :	Dokumentasi Pengadaan Gedung Instalasi Laundry Tahun 2019....	II-27
GAMBAR 7 :	Dokumentasi Pengadaan Gedung Instalasi Farmasi Tahun 2019...	II-27
GAMBAR 8 :	Dokumentasi Pengadaan Alkes Patient Monitor Tahun 2019.....	II-29
GAMBAR 9 :	Dokumentasi Pengadaan Alkes Mesin Anestesi Tahun 2019.....	II-29
GAMBAR 10 :	Dokumentasi Pengadaan Alkes Usg 3d Tahun 2019.....	II-30
GAMBAR 11 :	Grafik Capaian Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan sesuai Standar.....	II-32
GAMBAR 12 :	Dokumentasi Pelayanan Poli Spesialis Mata.....	II-65
GAMBAR 13 :	Dokumentasi Pelayanan Poli Spesialis Penyakit Dalam.....	II-66
GAMBAR 14 :	Dokumentasi Pelayanan Rongent Di Instalasi Radiologi.....	II-66
GAMBAR 15 :	Dokumentasi Pelayanan Makan Pasien Di Instalasi Gizi.....	II-66
GAMBAR 16 :	Grafik Capaian Kinerja Kualitas Layanan Rumah Sakit.....	II-67
GAMBAR 17 :	Dokumentasi Pengawasan Prosedur Pelayanan Di Instalasi Gawat Darurat Tahun 2019.....	II-73
GAMBAR 18 :	Dokumentasi Pengawasan Prosedur Pelayanan Di Instalasi Farmasi Tahun 2019.....	II-74
GAMBAR 19 :	Dokumentasi Pengawasan Prosedur Pelayanan Di Rawat Inap Kebidanan Tahun 2019.....	II-74
GAMBAR 20 :	Grafik Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit.....	II-75

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen rencana kerja untuk waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh Perangkat Daerah dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 yang tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk tahun rencana yang dimaksud.

Fungsi rencana kerja adalah menerjemahkan, mengoperasionalkan rencana strategis Perangkat Daerah ke dalam program dan kegiatan tahunan Perangkat Daerah sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Perangkat Daerah secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam renstra Perangkat Daerah.

RKPD tahun 2021 ini merupakan tahun ke-5 dan harus menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021. Pada saat penyusunan Renja RSUD dr. Achmad Darwis ini mempedomani Perubahan RPJMD 2016 – 2021 yang telah ditetapkan yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Perubahan Renstra BLUD RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 138 Tahun 2018. Dokumen Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 merupakan Rencana Kerja Tahun 2021 berupa program dan kegiatan yang diusulkan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah ditetapkan, mengacu RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah RSUD dr. Achmad Darwis adalah sebagai berikut :

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan Rancangan;
- III. Penyusunan Rancangan Renja;
- IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;

V. Perumusan Rancangan;

VI. Penetapan Renja;

I. Persiapan Penyusunan

1. Pengusulan personil tim penyusunan Renja dari RSUD untuk diusulkan oleh Bapelitbang ke dalam Keputusan Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2020.
2. Menghadiri pertemuan penyusunan Renja RSUD dr. Achmad Darwis yang melibatkan seluruh anggota tim penyusunan Renja di Bapelitbang. Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar sesama anggota tim dalam hal tatacara, kaidah serta jadwal penyusunan Renja.
3. Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun kalender penyusunan Renja. Adapun jadwal disusun sebagai berikut:

Tabel 1.

Kalender Penyusunan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021

No	Jenis/ Tahapan Kegiatan	Tahun 2020																											
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	Persiapan Penyusunan Renja 2021																												
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renja																												
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusunan Renja																												
3	Orientasi mengenai Renja RSUD dr. Achmad Darwis																												
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2021																												
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2020																												

No	Jenis/ Tahapan Kegiatan	Tahun 2020																															
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
2	Penyempurnaan ranwal berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																																
3	Penyampaian rancangan awal renja yang memuat rumusan kegiatan dan/atau kegiatan baru dalam forum Perangkat Daerah																																
C	Penyusunan Rancang Renja 2021																																
1	Penyusunan Rancangan Renja																																

No	Jenis/ Tahapan Kegiatan	Tahun 2020																															
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
2	Penyampaian Rancangan Renja kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD																																
3	Verifikasi Renja oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan Renja Bapelitbang sudah selaras dengan rancangan awal RKPD																																
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi																																

No	Jenis/ Tahapan Kegiatan	Tahun 2020																															
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
5	Penyampaian kembali rancangan renja yang telah disempurnakan kepada Bapelitbang																																
D	Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah																																
1	Pelaksanaan Forum Gabungan PD oleh Bapelitbang sekaligus merupakan Forum PD masing-masing OPD yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi PD bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program																																

	dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan renja PD																															
No	Jenis/ Tahapan Kegiatan	Tahun 2020																														
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
E	Perumusan Rancangan Akhir Renja																															
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir renja berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan di dalam perkada RKPD																															

No	Jenis/ Tahapan Kegiatan	Tahun 2020																															
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
4	Penyampaian rancangan akhir renja semua OPD oleh Bapelitbang kepada KD melalui sekretaris daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada																																
5	Penetapan Draft Perkada renja menjadi Perkada Renja OPD se-Kabupaten Lima Puluh Kota																																

II. Penyusunan Rancangan

Pada awal bulan Januari 2020 mulai dilakukan penyusunan rancangan awal Renja RSUD dr. Achmad Darwis. Penyusunan berpedoman pada Renstra BLUD RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2016-2021, Hasil Evaluasi Renja Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020.

Penyusunan rancangan awal Renja RSUD dr. Achmad Darwis disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

a. Pendahuluan;

- b. Hasil Evaluasi Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran RSUD dr. Achmad Darwis;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD dr. Achmad Darwis; dan
- e. Penutup.

III. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Renja merupakan Rancangan Awal Renja yang disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rancangan Renja RSUD dr. Achmad Darwis kemudian dibahas dan disempurnakan dalam Forum Gabungan Perangkat Daerah yang penyajian Rancangan Renja RSUD dr. Achmad Darwis disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja.

Pada bulan Maret, Rancangan Renja yang telah disusun dan disampaikan kepada Kepala Bapelitbang untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Berdasarkan hasil verifikasi dari tim di Bapelitbang, maka Rancangan Renja disempurnakan dan hasil penyempurnaan disampaikan kembali ke Bapelitbang.

IV. Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil koordinasi Bapelitbang dan OPD, maka demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Forum OPD dilaksanakan secara gabungan pada Forum Gabungan Perangkat Daerah di Bapelitbang. Forum Gabungan Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara

keepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir pada forum Gabungan Perangkat Daerah.

V. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan Rancangan Akhir Renja RSUD dr. Achmad Darwis merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja RSUD dr. Achmad Darwis menjadi Rancangan Akhir Renja RSUD dr. Achmad Darwis berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Renja RSUD dr. Achmad Darwis dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif RSUD dr. Achmad Darwis berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan Akhir RSUD dr. Achmad Darwis disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja RSUD dr. Achmad Darwis.

VI. Penutupan

Dalam hal penutupan Renja, Rancangan Akhir Renja RSUD dr. Achmad Darwis dikumpulkan ke Bapelitbang untuk di verifikasi dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penetapan Peraturan Bupati.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Rencana kerja ini dibuat berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang RumahSakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Suliki (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 60);
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 138 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 78);

27. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 33);
28. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Acara Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 nomor 43).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Rencana Kerja ini dibuat adalah

A. Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana kerja ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen awal perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Strategi (Renstra) RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2016 – 2021 dengan mempertimbangkan perubahan – perubahan situasi dan kondisi yang akan terjadi di tahun 2021.

B. Tujuan

1. Sebagai pedoman/acuan awal perencanaan program dan kegiatan tahun 2021.
2. Tersedianya bahan evaluasi kinerja tahun 2021.
3. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan agar efektif, efisien dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja RSUD dr. Achmad Darwis, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- II. Hasil Evaluasi Renja RSUD dr. Achmad Darwis, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis tahun lalu dan capaian Renstra RSUD dr. Achmad Darwis, analisa Kinerja pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dr. Achmad

Darwis, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja RSUD dr. Achmad Darwis dan Program dan Kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis .
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisikan Rencana Kinerja RSUD dr. Achmad Darwis dan Rencana Pendanaan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021 serta tahun berencana maju (Tahun 2022)
- V. Penutup berisikan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
RSUD dr. ACHMAD DARWIS TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD dr. Achmad Darwis

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2019 sekaligus realisasi APBD Tahun 2019 RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.

Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2019

No	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Administrasi Perkantoran	818.104.000,00	842.286.500,00	752.192.277,00	89,30
1	Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	549.450.000,00	549.450.000,00	471.844.513,00	85,88
2	Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	177.890.000,00	177.890.000,00	177.810.000,00	99,96
3	Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	8.850.000,00	88,50
4	Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman	17.920.000,00	15.427.500,00	15.291.000,00	99,12

5	Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	62.844.000,00	89.519.000,00	78.396.764,00	87,58
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70.792.750,00	86.792.750,00	66.770.700,00	76,93
1	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	70.792.750,00	86.792.750,00	66.770.700,00	76,93
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.919.400,00	7.794.400,00	7.758.400,00	99,54
1	Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.919.400,00	7.794.400,00	7.758.400,00	99,54
IV	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata	11.391.774.000,00	11.518.446.243,00	10.985.110.042,00	95,37
1	Kegiatan : Pengadaan alat-alat rumah sakit	8.205.299.000,00	8.331.971.243,00	8.008.847.010,00	96,12

2	Kegiatan : Pembangunan Gedung Instalasi Laundry	991.250.000,00	991.250.000,00	896.873.032,00	90,48
3	Kegiatan : Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi	2.195.225.000,00	2.195.225.000,00	2.079.390.000,00	94,72
V	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.045.450.000,00	890.850.000,00	748.734.336,00	84,05
1	Kegiatan : Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	845.450.000,00	640.850.000,00	499.200.000,00	77,90
2	Kegiatan : Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	200.000.000,00	250.000.000,00	249.534.336,00	99,81
VI	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	20.384.867.000,00	24.936.166.082,17	22.556.176.494,00	90,46
1	Kegiatan : Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	20.384.867.000,00	24.936.166.082,17	22.556.176.494,00	90,46
VII	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	-	447.000.000,00	432.736.171,00	96,81
1	Kegiatan: Sarana Pelayanan Kesehatan	-	447.000.000,00	432.736.171,00	96,81
	JUMLAH	33.715.907.150,00	38.729.335.975,17	35.549.478.420,00	91,79

Tabel 3 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD dr. Achmad Darwis dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Bejalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 01 02 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	809.220.000,00	2.854.991.321,00	842.286.500,00	752.192.277,00	89,30	809.220.000,00	4.416.403.598,00	5,46
1 01 02 02 01 01	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pengadaan materai, perangko dan pengiriman surat kilat khusus	-	8.625.000,00	-	-	-	-	8.625.000,00	0
1 01 02 02 01 02	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, rekening air, rekening listrik dan langganan koran/ majalah	588.000.000	1.315.837.249,00	549.450.000,00	471.844.513,00	85,88	588.000.000,00	2.375.681.762,00	4,04
1 01 02 02 01 07	Kegiatan pelayanan administrasi keuangan	Jumlah pembayaran honorarium tim pelaksanaan kegiatan, honorarium tenaga PTTD rumah sakit dan belanja perjalanan dinas dalam daerah	171.800.000	549.710.000,00	177.890.000,00	177.810.000,00	99,96	171.800.000,00	899.320.000,00	5,23
1 01 02 02 01 10	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor rumah sakit	-	176.179.100,00	-	-	-	-	176.179.100,00	-
1 01 02 02 01 11	Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	-	-	10.000.000,00	8.850.000,00	88,50	-	8.850.000,00	-
1 01 02 02 01 12	Kegiatan penyediaan komp listrik /Penerangan kantor	Jumlah komponen listrik/ penerangan kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
1 01 02 02 01 13	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
1 01 02 02 01 17	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan dan minum rapat dan tamu yang disediakan	17.920.000	556.548.000,00	15.427.500,00	15.291.000,00	99,12	17.920.000,00	589.759.000,00	32,91
1 01 02 02 01 18	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	31.500.000	248.091.972,00	89.519.000,00	78.396.764,00	87,58	31.500.000,00	357.988.736,00	11,36

1	01	02	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	59.645.650,00	400.396.575,00	86.792.750,00	66.770.700,00	76,93	45.075.650,00	512.242.925,00	8,59	
1	01	02	02	02	05	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	02	02	09	Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	-	194.568.000,00	-	-	-	194.568.000,00	-	
1	01	02	02	02	24	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	59.645.650	205.828.575,00	86.792.750,00	66.770.700,00	76,93	45.075.650,00	317.674.925,00	5,33
1	01	02	02	02	28	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	02	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	02	03	01	kegiatan pengadaan penunjuk waktu/ mesin absensi	Jumlah mesin absensi yang akan diadakan	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	02	03	02	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang akan diadakan	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kinerja sumber daya aparatur	-	228.595.714,00	-	-	-	-	228.595.714,00	-	
1	01	02	02	05	01	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bimtek/workshop/sosialisasi di Rumah Sakit	-	228.595.714,00	-	-	-	228.595.714,00	-	
1	01	02	02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.131.000	10.612.350,00	7.794.400,00	7.758.400,00	99,54	3.131.000,00	21.501.750,00	6,87	
1	01	02	02	06	01	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah dokumen laporan perencanaan, dokumen anggaran dan laporan kinerja perencanaan	3.131.000	10.612.350,00	7.794.400,00	7.758.400,00	99,54	3.131.000,00	21.501.750,00	6,87
1	01	02	02	23	Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Standarisasi Pelayanan Kesehatan RS	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	02	23	08	Kegiatan penyusunan perencanaan program dan kegiatan	Jumlah dokumen masterplan rumah sakit sesuai dengan standar rumah sakit klas C	-	-	-	-	-	-	-	

1	01	02	02	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan promosi kesehatan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	02	02	19	01	Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah kegiatan promosi kesehatan di RS untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik yang akan dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-
1	01	02	02	26		Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	9.905.920.000,00	24.925.888.822,12	11.518.446.243,00	10.985.110.042,00	95,37	6.437.252.849,00	42.348.251.713,12	4,28
1	01	02	02	26	20	Kegiatan pengadaan kendaraan ambulance/ mobil jenazah	Jumlah kendaraan ambulance untuk pelayanan rujukan pasien	-	1.488.189.720,00	-	-	-	-	1.488.189.720,00	-
1	01	02	02	26	04	Kegiatan pembangunan ruang rawat inap RS (VVIP, VIP, Kls I,II,III)	Jumlah sarana rumah sakit untuk pelayanan pasien rawat inap rumah sakit	3.809.350.000	11.177.876.869,12	-	-	-	1.030.682.849,00	12.208.559.718,12	3,20
						Kegiatan : Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Jumlah pembangunan instalasi pengolahan limbah RS	-	980.550.000,00	-	-	-	-	980.550.000,00	-
1	01	02	02	26	18	Kegiatan pengadaan alat-alat rumah sakit	Jumlah alat kesehatan/ kedokteran sesuai standar peralatan rumah sakit klas C	6.096.570.000	10.995.105.613,00	8.331.971.243,00	8.008.847.010,00	96,12	5.296.570.000,00	24.300.522.623,00	3,99
1	01	02	02	26	25	Kegiatan pengembangan tipe rumah sakit	Nilai akreditasi rumah sakit	-	284.166.620,00	-	-	-	110.000.000,00	394.166.620,00	-
1	01	02	02	26	26	Kegiatan : Pembangunan Gedung Instalasi Laundry	Jumlah pembangunan sarana rumah sakit	-	-	991.250.000,00	896.873.032,00	90,48	-	896.873.032,00	-
1	01	02	02	26	27	Kegiatan : Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi	Jumlah pembangunan sarana rumah sakit	-	-	2.195.225.000,00	2.079.390.000,00	94,72	-	2.079.390.000,00	-
1	01	02	02	27		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	-
1	01	02	02	27	01	Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala rumah sakit	Jumlah gedung rumah sakit yang terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	-
1	01	02	02	28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	827.700.000,00	2.571.748.637,00	890.850.000,00	748.734.336,00	84,05	732.270.000,00	4.052.752.973,00	4,90
1	01	02	02	28	05	Kegiatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan para medis	Jumlah kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit	577.700.000	1.466.655.500,00	640.850.000,00	499.200.000,00	77,90	482.270.000,00	2.448.125.500,00	4,24
1	01	02	02	28	07	Kegiatan kemitraan pengobatan pasien kurang mampu	Jumlah pengobatan bagi pasien kurang mampu	250.000.000	1.105.093.137,00	250.000.000,00	249.534.336,00	99,81	250.000.000,00	1.604.627.473,00	6,42

1	01	02	02	33		Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD RS	Persentase peningkatan mutu pelayanan BLUD rumah sakit	24.384.867.000,00	63.631.327.908,00	24.936.166.082,17	22.556.176.494,00	90,46	27.103.434.255,00	113.290.938.657,00	4,65
1	01	02	02	33	01	Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD rumah sakit	Jumlah kunjungan pasien yang dilayani di rumah sakit : rawat jalan dan rawat inap	24.384.867.000	63.631.327.908,00	24.936.166.082,17	22.556.176.494,00	90,46	27.103.434.255,00	113.290.938.657,00	4,65
1	01	02	02	34		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alkes pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang bersumber dari dana DBHCHT	-	2.613.222.919,00	447.000.000,00	432.736.171,00	96,81	-	3.045.959.090,00	-
1	01	01	02	34	02	Kegiatan sarana pelayanan kesehatan	Jumlah sarana sarana, prasarana dan alkes pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang bersumber dari dana DBHCHT	-	2.613.222.919,00	447.000.000,00	432.736.171,00	96,81	-	3.045.959.090,00	-
						JUMLAH		35.990.483.650,00	97.236.784.246,12	38.729.335.975,17	35.549.478.420,00	91,79	35.130.383.754,00	167.916.646.420,12	4,67

Berdasarkan Tabel 3 (T-C.29) Evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi Renja Tahun 2019 dapat di jelaskan sebagai berikut :

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, anggaran dan realisasi, serta keluaran dan capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 549.450.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 471.844.513,00 atau 85,88% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah pembayaran rekening telepon, rekening air, rekening listrik dan langganan koran/majalah, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air, listrik dan langgana koran/ majalah unt 12 bulan.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 177.890.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 177.810.000.00 atau 99,96% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah pembayaran honorarium PNS, honorarium non PNS (PTTD) dan perjalanan dinas dalam daerah, dengan capaian kinerja berupa terbayarnya honorarium PNS, honorarium non PNS (PTTD) dan perjalanan dinas dalam daerah untuk 12 bulan.
3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 8.850.000,00 atau 88,50% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah media informasi yang di cetak, dengan capaian kinerja berupa terbayarnya media informasi yang di cetak untuk 12 bulan.
4. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.427.500,00 dan realisasi keuangan Rp. 15.291.000,00 atau 99,12% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah porsi makan dan minum rapat dan tamu yang

disediakan, dengan capaian kinerja berupa terbayarnya makan minum rapat dan tamu rumah sakit untuk 12 bulan.

5. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.519.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 78.396.764,00 atau 87,58% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi, dengan capaian kinerja berupa terbayarnya belanja perjalanan dinas luar daerah untuk 12 bulan.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 86.792.750,00 dan realisasi keuangan Rp. 66.770.700,00 atau 76,93% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan berupa service, penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak dan pajak kendaraan bermotor sebanyak 5 kendaraan roda empat dan 2 kendaraan roda dua.

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.794.400,00 dan realisasi keuangan Rp. 7.758.400,00 atau 99,54% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen laporan perencanaan, dokumen anggaran, laporan kinerja perencanaan dan kegiatan monev perencanaan rumah sakit, dengan capaian kinerja berupa tersedianya dokumen laporan perencanaan, dokumen anggaran, laporan kinerja perencanaan dan kegiatan monev perencanaan rumah sakit.

IV. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.331.971.243,00 dan realisasi keuangan Rp. 8.008.847.010,00 atau 96,12% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah alat kesehatan rumah sakit, dengan capaian kinerja berupa tersedianya peralatan kesehatan ruang operasi, ruang penyakit dalam, ruang klinik Sp. Kebidanan dan kandungan dan ruang CSSD serta alat kesehatan perawatan
2. Kegiatan Pembangunan Gedung Instalasi Laundry dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 991.250.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 896.873.032,00 atau 90,48% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah pembangunan sarana rumah sakit, dengan capaian kinerja berupa tersedianya 1 unit Gedung Instalasi Laundry.
3. Kegiatan Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.195.225.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 2.079.390.000,00 atau 94,72% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah pembangunan sarana rumah sakit, dengan capaian kinerja berupa tersedianya 1 unit Gedung Instalasi Farmasi.

V. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1. Kegiatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 640.850.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 499.200.000,00 atau 77,90% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit, dengan capaian kinerja berupa Terlaksananya kegiatan pelayanan pasien oleh dokter reveral dan dokter WKDS selama 12 bulan.
2. Kegiatan Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 249.534.336,00 atau 99,81% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah pengobatan bagi pasien

kurang mampu, dengan capaian kinerja berupa terlayannya pelayanan pengobatan pasien kurang mampu di rumah sakit selama 12 bulan.

VI. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

1. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.936.166.082,17 dan realisasi keuangan Rp. 22.556.176.494,00 atau 90,46% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 93,53%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah kunjungan pasien yang dilayani di Rumah Sakit : Rawat Jalan dan Rawat Inap, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Kegiatan PPK-BLUD RS dan penggunaan perkiraan surflus BLUD RS th 2018.

VII. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

1. Kegiatan Sarana Pelayanan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 447.000.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 432.736.171,00 atau 96,81% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah alat kedokteran dan alat kesehatan di rumah sakit yang bersumber dari dana DBHCHT , dengan capaian kinerja berupa tersedianya alat kedokteran dan alat kesehatan di rumah sakit yang bersumber dari dana DBHCHT.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr Achmad Darwis

2.2.1 Kinerja Pelayanan Medik

Kinerja pelayanan medik dapat dilihat dari kunjungan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Kinerja pelayanan rawat jalan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.

Kinerja Pelayanan Rawat Jalan RSUD dr Achmad Darwis th 2015-2019

Kinerja kegiatan.	2015	2016	2017	2018	2019	Trend 2019
Poli umum	2446	830	181	168	98	Menurun
Peny. Dalam	4408	4583	7282	7935	8362	Meningkat
Peny. Anak	1933	1591	1470	1734	1945	Meningkat
Peny. Bedah	2803	3487	4014	3804	3772	Menurun
Obgyn	809	804	1354	1595	1629	Meningkat

Peny. Mata	2782	3721	5741	3525	4337	Meningkat
Peny THT	752	941	0	804	1457	Meningkat
Poli gigi	749	765	682	640	622	Menurun
Poli Syaraf	2042	2694	3107	3297	3297	Tetap
Poli Kulit Kelamin	0	0	0	1135	1484	Meningkat
Poli Paru	889	766	2039	2852	3485	Meningkat
Poli Jantung	684	904	1755	2266	3032	Meningkat
Poli Jiwa	101	15	0	731	717	Menurun
Fisioth, gizi, rehabilitas medis	1231	1382	1852	1122	1032	Menurun
Perinatologi/bayi	-	-	-	-	5	Meningkat
Total kunjungan	19.742	21.629	22.483	29.477	35.274	Meningkat

Sumber : data MR RSUD dr. Achmad Darwis 2019

Dari data diatas terlihat bahwa total kunjungan rawat jalan pada tahun 2019 meningkat 19,67 % tetapi ada beberapa unit pelayanan yang kinerjanya menurun seperti pelayanan poli umum menurun 41,67 %, poli gigi menurun 2,81 %, poli penyakit bedah menurun 0,84%, Poli Jiwa menurun 1,92% dan Fisioterapi,gizi dan rehabilitasi medis menurun 8,02%.

Pelayanan poliklinik dokter umum menurun karena aturan BPJS bahwa rumah sakit hanya melayani poli spesialis karena merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 2 atau lanjutan dan untuk pelayanan dokter umum berada di Puskesmas yang mana merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 1 atau dasar.

Kunjungan poli umum menurun disebabkan sebagian pasien poli umum lebih memilih pelayanan spesialistik sejalan dengan status RSUD dr. Achmad Darwis sebagai pusat rujukan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Secara umum kunjungan rawat jalan tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 meningkat sebesar 19,67 %.

Dengan demikian kinerja pemanfaatan layanan rawat jalan dapat tercapai dimana terjadi peningkatan 19,67 % dibanding sebelumnya.

Kinerja pelayanan rawat inap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.
Kinerja Pelayanan Rawat Inap RSUD dr. Achmad Darwis th 2015-2019

Kinerja kegiatan.	2015	2016	2017	2018	2019	Trend Th. 2019
Kunjungan Rawat Inap Peny. Dalam	1426	1663	1061	1636	1774	Meningkat
Kunjungan Rawat Inap Bedah	853	888	901	848	805	Menurun
Kunjungan Rawat Inap Anak	235	450	267	484	526	Meningkat
Kunjungan Rawat Inap Obygn & Gynekologi	690	695	720	811	553	Menurun
Kunjungan Rawat Inap Perinatologi	322	185	203	493	284	Menurun
Kunjungan Rawat Inap ICU	173	3	200	4	2	Menurun
Kunjungan Rawat Inap Penyakit Mata	37	22	35	15	28	Meningkat
Kunjungan Rawat Inap Paru	0	0	0	54	64	Meningkat
Kunjungan Rawat Inap Jantung	0	0	0	29	33	Meningkat
Kunjungan Rawat Inap Kulit Kelamin	0	0	0	4	3	Menurun
Kunjungan Rawat Inap Saraf	0	0	0	11	31	Meningkat
Kunjungan Rawat Inap THT	0	0	0	13	25	Meningkat
Kunjungan Rawat Inap Jiwa	0	0	0	0	1	Meningkat
BOR	37.3	43.95	50,2	53,6	53,6	Tetap
ALOS	3.1	3.30	3,7	3,5	3,5	Tetap
TOI	6.3	5.10	4,5	3,9	3,9	Tetap
BTO	36.5	40.1	40,5	43,7	43,7	Tetap
GDR	2.93	3.50	4,37	5,58	5,28	Menurun
NDR	1.87	1.65	1,71	3,65	1,86	Menurun

Jml Pasien	3736	3906	3387	4402	4129	Menurun
Jlh TT	101	101	101	101	101	

Sumber : data MR RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2019

Catatan :

- Angka BOR yang baik adalah 60% - 85%.
- Av. LOS yang baik adalah antara 6-9 hari.
- Angka ideal BTO adalah antara 40 – 50 kali.
- Angka TOI yang baik adalah 1 – 3 hari.
- GDR adalah Angka kematian seluruh pasien pasien yang pernah bersentuhan dengan rumah sakit kurang dari 48 jam.
- NDR adalah angka kematian pasien yang sedang dirawat di rumah sakit lebih dari 48 jam

Dari tabel diatas terlihat kunjungan pasien rawat inap tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 6,20 % dari tahun 2018. Terdapat beberapa peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada rawat inap penyakit dalam (internis), rawat inap anak, Mata, Jantung, Saraf dan THT, namun terjadi penurunan pada kunjungan rawat inap pasien Penyakit Bedah, Obgyn, Perinatologi, ICU dan rawat inap Kulit dan kelamin.

Angka BOR RSUD dr Achmad darwis belum memenuhi standar dalam arti pelayanan RS belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Hal ini merupakan dampak kelemahan RSUD pada lokasi yang kurang strategis, sarana dan prasarana yang masih terbatas sejalan dengan ketersediaan anggaran yang masih terbatas pada pemenuhan sarana rawat inap terutama sarana ruang rawatan Kelas I dan kelas utama.

Berdasarkan indikator kinerja rumah sakit lainnya :

1. Terlihat bahwa ada perubahan tingkat hunian rumah sakit (BOR), dimana pada tahun 2015 yaitu 37,3% tahun 2016 43,95% tahun 2017 50,2% tahun 2018 53,6% dan pada tahun 2019 tetap 53,6%.
jumlah tempat tidur 101 TT, Ini berarti untuk pemakaian tempat tidur di rumah sakit yang ditempati pasien setiap hari masih tetap sama pada tahun 2019 ini.
2. Lama hari rawat rata penderita (Av LOS) pada tahun 2015 yaitu 3,1 hari, tahun 2016 yaitu 3,30 hari , tahun 2017 yaitu 3,70 hari, tahun 2018 yaitu 3,50 hari dan tahun 2019 yaitu 3,50 hari , hampir sama lama dirawat dibandingkan tahun 2018 yaitu 3 hari, dan ini lebih rendah dari standar nasional (6-9) hari. Angka ini menggambarkan tiga hal :

- Pasien cepat sembuh, tingginya tingkat pelayanan pasien.
 - Paket klaim BPJS dengan pelayanan INA CBGs merubah pola pelayanan agar pasien cepat sembuh karena nilai pembayaran tidak berdasarkan lama rawatan akan tetapi paket diagnosa sehingga pasien dengan grup yang sama akan dibayarkan sama tanpa mempertimbangkan lama rawatan.
 - Pasien pulang meninggal atau dirujuk.
3. Angka BTO yang 40 kali menggambarkan bahwa satu tempat tidur rata-rata dipakai 40 kali oleh penderita selama satu tahun. Angka ini berarti frekwensi pemakaian tempat tidur akan bertambah dibanding tahun sebelumnya, Tahun 2018 yaitu 43 kali dan tahun 2019 yaitu 43 kali.
 4. Angka TOI yang 4 hari menggambarkan bahwa 1 tempat tidur mengganggu (tidak ditempati pasien) sebelum ditempati pasien berikutnya rata-rata 4 hari. Hal ini menunjukkan lama tempat tidur mengganggu tahun 2018 yaitu 3 hari hampir sama kalau dibandingkan pada tahun 2019 yaitu 3 hari.

Tabel 6.

Data Hari Rawatan di Rawat Inap RSUD dr. Achmad Darwis th 2015-2019.

Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	Trend Tahun 2019
Hari Rawatan Rawat Inap Peny. Dalam	5445	7125	7920	7528	6610	Menurun
Hari Rawatan Rawat Inap Bedah	3703	3636	3575	3711	2414	Menurun
Hari Rawatan Rawat Inap Anak	1076	2075	1833	2267	1778	Menurun
Hari Rawatan Rawat Inap Obgyn & Gynekologi	2550	2482	2205	2876	1380	Menurun
Hari Rawatan Rawat Inap Perinatologi	1544	858	988	2172	1032	Menurun
Hari Rawatan Rawat Inap ICU	596	8	11	16	5	Menurun
Hari Rawatan Rawat Inap Penyakit Mata	0	62	109	30	35	Meningkat
Hari Rawatan Penyakit Jantung	0	0	83	123	118	Menurun

Hari Rawatan Penyakit Paru	0	0	172	239	277	Meningkat
Hari Rawatan Penyakit Saraf	0	0	43	37	157	Meningkat
Hari Rawatan Penyakit Kulit dan Kelamin	0	0	20	23	28	Meningkat
Hari Rawatan Penyakit THT	0	0	0	62	80	Meningkat
Hari Rawatan Penyakit Jiwa	0	0	0	0	4	Meningkat
Jumlah Hari Rawatan	13781	16246	16959	19084	13918	Menurun

Sumber: data MR RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2019.

Dari tabel diatas terlihat jumlah hari rawatan pasien rawat inap tahun 2019 terjadi penurunan 27,07% dari tahun 2018. Terdapat beberapa penurunan yang cukup signifikan jumlah hari rawatan yaitu pada rawat inap penyakit dalam, Bedah, Anak Obgyn & Gynekologi, Perinatologi, ICU, Jantung dan peningkatan jumlah hari rawatan pada rawatan Mata ,Paru, Syaraf, Kulit dan Kelamin, THT dan Jiwa.

Tabel 7.
Data Kunjungan Gawat Darurat dan Kamar Operasi th 2015-2019

Kinerja Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	Trend 2019
Kunj IGD	7046	5851	5704	6694	6789	Meningkat
Op. Besar	864	5343	817	769	798	Meningkat
Op. Sedang	235	422	463	574	463	Menurun
Op. Kecil	33	21	8	7	12	Meningkat
Op obgyn	318	300	331	369	317	Menurun
Jumlah kunj Operasi	1450	6086	1288	1350	1273	Menurun

Sumber: data MR RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2018

Dari data diatas terlihat peningkatan jumlah kunjungan IGD pada tahun 2019 dibanding rata-rata tahun 2018 yaitu sebesar 1,42%. Sedangkan untuk pelayanan operasi di kamar operasi/bedah rumah sakit pada tahun 2019 terjadi penurunan dari tahun 2018 sebesar 5,70%.

2.2.2 Kinerja Pelayanan Penunjang

Kinerja pelayanan penunjang dapat dilihat dari kunjungan pelayanan laboratorium, radiologi dan pelayanan farmasi seperti tabel berikut :

Tabel 8.
Kinerja Pelayanan Penunjang Medis RSUD dr. Achmad Darwis Th2015-2019

Kinerja keg.	2015	2016	2017	2018	2019	Trend 2019
Kunj. laboratorium	8.887	9.180	13.749	42.815	18.389	Menurun
Kunj. Radiologi	3.673	3.585	3.950	3.697	4.368	Meningkat
Jlh R/ farmasi	97.774	114.461	112.297	190.469	203.402	Meningkat
Kunj. Rehabilitasi Medik	1.400	1.307	1.723	1.283	1.608	Meningkat
Kunj. UTDRS	502	715	819	667	564	Menurun

Sumber : data MR RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2019

Dari tabel diatas trend kinerja pelayanan penunjang meningkat. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan kunjungan yang signifikan dalam tahun 2019 khususnya kunjungan Radiologi, Farmasi dan Rehabilitasi Medik. Kunjungan Pelayanan Instalasi Radiologi meningkat sebesar 18,15 % dibandingkan tahun kemarin, begitu pula dengan kunjungan untuk peresepan di Instalasi Farmasi menurun sebesar 6,79% dibandingkan tahun kemarin dan Kunjungan Pelayanan Rehabilitasi Medik meningkat sebesar 25,33 % dibandingkan tahun kemarin . Sedangkan untuk kunjungan Instalasi Laboratorium terjadi penurunan sebesar 57,05% dibandingkan tahun kemarin, hal ini disebabkan pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium lebih sedikit dibandingkan tahun kemarin.

Penilaian mutu pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis belum dievaluasi secara keseluruhan. Tabel dibawah ini menunjukkan beberapa penilaian yang telah dilakukan di RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2019.

Tabel 9.

Evaluasi Kinerja Pelayanan RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	% Capaian
1	Terpenuhi sumber daya rumah sakit	Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	65,00%	87,98%
2	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target	78,00%	79,57%
3	Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00%	80,08%
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja rumah sakit	Nilai akuntabilitas kinerja rumah sakit	70,00%	63,89%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase sumber daya rumah sakit sesuai standart RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2019 adalah sebesar 87,98%.

Adapaun penjelasan komponen – komponen yang termasuk dalam sumber daya rumah sakit sesuai standart adalah sebagai berikut :

1. Persentase Jenis Obat yang Terpenuhi

Jenis obat yang di rencanakan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2019 sebanyak 436 jenis obat, sedangkan pengadaan atau pembelian obat pada tahun 2019 sebanyak 322 jenis obat yang terpenuhi.

Jumlah item pembelian, pengadaan dan pemakaian obat fluktuatif per bulan pelayanan. Permintaan, pembelian dan penyediaan obat tergantung kasus penyakit yang ada perbulannya dengan memperhatikan pemakaian bulan sebelumnya, apabila tidak ada pemakaian/ kasus bulan berjalan maka tidak diadakan pembelian bulan berikutnya demikian juga sebaliknya. Penyusunan dan perencanaan di RBA merujuk kepada RKO Nasional berdasarkan pola

konsumsi pada tahun sebelumnya. Pembelian vaksin tidak direncanakan di RSUD dr. Achmad darwis dan apabila ada kasus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten / Propinsi.

Adapun perhitungan jenis obat yang terpenuhi selama tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

RUMUS :

$$\frac{\text{Jumlah jenis obat yang dibeli}}{\text{Jumlah jenis obat yang dianggarkan}} \times 100 =$$

$$\frac{322}{436} \times 100 = 73,85\%$$

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa untuk komponen Persentase Jenis Obat yang Terpenuhi di RSUD dr. Achmad Darwis pada tahun 2019 adalah sebesar 73,85 %.

Dokumentasi Kegiatan Sumber Daya Rumah Sakit Pengadaan Obat- Obatan Rumah Sakit Tahun 2019 :

Gambar 1

Dokumentasi Pengadaan Obat- Obatan Rumah Sakit Tahun 2019



Gambar 2

Dokumentasi Pemeriksaan Pengadaan Obat- Obatan Tahun 2019



2. Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai standar pada tahun 2019 adalah :

a. Jumlah pegawai yang harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).

Pada Tahun 2019 Jumlah Pegawai yang harus memiliki STR ditargetkan sebanyak 224 oran (seharusnya sebanyak 257 orang), terealisasi sebanyak 256 orang.

Rincian jumlah pegawai yang harus memiliki STR sebanyak 257 orang adalah sebagai berikut :

- Profesi Dokter 32 Orang.
- Perawat 118 orang.
- Perawat Gigi 2 orang.
- Penata Anestesi 4 orang.
- Bidan 46 orang.
- Apoteker 6 orang.
- Teknis Kefarmasian 14 orang.
- Kesling 1 orang.
- Gizi 2 orang.
- Fisiotherapi 3 orang.
- Radiografer 6 orang.
- Elektromedis 1 orang.
- Refraksi Optision 2 orang.
- Ahli Tekhnologi Laboratorium 12 orang.
- Perekam Medis 8 orang.

Rincian realisasi jumlah pegawai yang memiliki STR sebanyak 256 orang adalah sebagai berikut :

- Profesi Dokter 32 Orang.
- Perawat 118 orang.
- Perawat Gigi 2 orang.
- Penata Anestesi 4 orang.
- Bidan 46 orang.
- Apoteker 6 orang.
- Teknis Kefarmasian 14 orang.
- Kesling 0 orang.

- Gizi 2 orang.
- Fisiotherapi 3 orang.
- Radiografer 6 orang.
- Elektromedis 1 orang.
- Refraksi Optision 2 orang.
- Ahli Tekhnologi Laboratorium 12 orang.
- Perekam Medis 8 orang.

Rincian realisasi jumlah pegawai yang tidak memiliki STR sebanyak 2 orang adalah sebagai berikut :

- Dokter 1 orang
- Kesling 1 orang

$$\text{Perhitungan} : \frac{256}{257} \times 100 = 99,61 \%$$

- b. Jumlah pegawai rumah sakit yang akan mengikuti diklat, sosialisasi, workshop dan Bimtek.

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, sosialisasi, workshop dan bimtek pada tahun 2019 di targetkan 371 orang, terealisasi sebanyak 566 orang.

$$\text{Perhitungan} : \frac{566}{371} \times 100 = 152,56\%$$

Adapun diklat, Sosialisasi, workshop dan bimtek yang diikuti pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Mengikuti workshop dan seminar Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) di Fasyankes sebanyak 5 orang.
- Mengikuti pelatihan Aseptik Dispensing (IV idmixture dan total parental nutrisions) sebanyak 2 orang.
- Mengikuti Acara Basic Advanced and Workshop in Transfusion) sebanyak 1 orang.
- Mengikuti study Pembelajaran tentang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat (PKPO) dan layanan unggulan di RSUD Pasar Rebo Jakarta sebanyak 5 orang.
- Mengikuti seminar sehari flora training centre (FTC) dengan tema penerapan early warning scoring system (EWS) dalam menurunkan angka hospital cardiac arrest pada akreditasi SNARS 2019 sebanyak 9 orang.

- Mengikuti sosialisai dan workshop remunerasi 3P sebanyak 50 orang.
- Mengikuti seminar dan workshop dalam bidang operasi telinga dan sinus per Endoskopi, Jakarta Endoscopic ear & surgeri course (JE2S) sebanyak 1 orang.
- Mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa sebanyak 1 orang.
- Mengikuti sosialisasi pelayanan IGD Ponrek, pelayanan Keperawatan, Monitoring dan Evaluasi Hais oleh IPCN sebanyak 7 orang.
- Mengikuti workshop pengelolaan asuhan keperawatan sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1 sebanyak 1 orang.
- Mengikuti pelatihan keperawatan intensif dasar (ICU dasar) angkatan ke 3 plus UKOM kekhususan sebanyak 3 orang.
- Mengikuti seminar dan workshop Central Steril Supply Departemen (CSSD) sebanyak 4 orang.
- Mengikuti diklat Bantuan Hidup Dasar bagi awam sebanyak 1 orang.
- Mengikuti pelatihan Advance Cardiac Life Support (ACLS) sebanyak 1 orang.
- Mengikuti workshop pelayanan kefarmasian dan pengelolaan obat sebanyak 2 orang.
- Mengikuti workshop eksternal kurikulum pendidikan profesi bidan sebanyak 1 orang.
- Mengikuti talkshow dan seminar keperawatan sebanyak 1 orang.
- Mengikuti pelatihan asesor kompetensi kerja bidan klinik di RSUP M. Djamil Padang sebanyak 1 orang.
- Mengikuti workshop khusus Manajer Pelayanan Pasien (MPP) dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1 sebanyak 1 orang.
- Mengikuti pelatihan penguatan tenaga coder INA CBGs sebanyak 1 orang.
- Mengikuti sosialisasi puskesmas ramah anak (KLA Kluster Kesehatan dan Kesejahteraan) sebanyak 1 orang.
- Mengikuti pelatihan teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BLUD RSUD 2019 sebanyak 3 orang.
- Mengikuti bimbingan teknis insentif penatausahaan keuangan sebanyak 3 orang.

- Mengikuti teknis insentif penatausahaan keuangan sebanyak 1 orang.
- Mengikuti workshop para pimpinan dan direktur serta pokja akreditasi rumah sakit sebagai asesor internal sebanyak 10 orang.
- Mengikuti sosialisasi pengelolaan statistik sektoral dan big data sebanyak 2 orang.
- Mengikuti sosialisasi penerimaan PPDS/PGDS dan permasalahan dokter PPDS di rumah sakit sebanyak 1 orang.
- Mengikuti pelatihan coding dan manajemen verifikasi internal dalam dispute klaim serta implementasi digitalisasi klaim menggunakan aplikasi siranap dan aslk di era JKN sebanyak 2 orang.
- Mengikuti pertemuan ilmiah tahunan perhimpunan dokter spesialis bedah indonesia ke 23 sebanyak 1 orang.
- Mengikuti pertemuan ilmiah tahunan perhimpunan dokter spesialis kulit dan kelamin (PIT XVII PERDOSKI) sebanyak 1 orang.
- Mengikuti simposium dan workshop pertemuan ilmiah Nasional (PIN) PB PARDI XVI sebanyak 1 orang.
- Mengikuti sosialisasi Konas 15 PIT 44 PERDAMI Universal Eye Health sebanyak 1 orang.
- Mengikuti bimbingan teknis penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun anggaran 2020 sebanyak 2 orang.
- Mengikuti pertemuan ilmiah PIT Perdami VIII dengan tema comprehensive musculoskeletal imaging in advancing age sebanyak 1 orang.
- Mengikuti workshop orientasi pembiayaan KB melalui Ina CBGs di FKRTL dan forum peningkatan pelayanan KB MKJP di Fasyankes pemerintah dan swasta propinsi Sumbar tahun 2019 sebanyak 1 tahun.
- Mengikuti studi pembelajaran akreditasi SNARs di RSUD dr. Rasidin Padang sebanyak 70 orang.
- Mengikuti sosialisasi dan diskusi implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 16 Tahun 2019 sebanyak 3 orang.
- Mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undangan di Bidang cukai dan Retribusi dan penerimaan lain – lain dengan materi Evaluasi pelaksanaan DBHCHT semester I TA 2019 dan pemantauan progres

penggunaan DBHCHT untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional sebanyak 2 orang.

- Mengikuti sosialisasi dan pembentukan Sub Klaster Kesehatan Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 1 orang.
- Mengikuti sosialisasi DED jaringan TIK Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 2 orang.
- Mengikuti bimbingan teknis keprotokolan sebanyak 2 orang.
- Mengikuti workshop evaluasi evaluasi RKPD triwulan III Lingkup Bidang SDM, Sosbud dan pemerintah sebanyak 2 orang.
- Mengikuti sosialisasi pertemuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun 2020 sebanyak 4 orang.
- Mengikuti workshop dan simposium dalam kegiatan ilmiah tahunan UKK Neonatologi IDAI yang berskala Nasional sebanyak 2 orang.
- Mengikuti sosialisasi uji coba aplikasi SIMPEL AJA dilingkungan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 2 orang.
- Mengikuti sosialisasi Inovasi publik sebanyak 2 orang.
- Mengikuti sosialisasi Smart Branding sebanyak 2 orang.
- Mengikuti sosialisasi integrasi dokumen lingkungan hidup ke dalam dokumen perencanaan pembangunan sebanyak 2 orang.
- Mengikuti sosialisasi penggunaan aplikasi e-persuratan sebanyak 2 orang.
- Mengikuti seminar dan workshop tentang integrasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam peningkatan jenjang karier perawat fungsional melalui Uji Kompetensi (UKOM) sebanyak 2 orang.
- Mengikuti pelatihan jabfung sanitarian ahli sebanyak 1 orang.
- Mengikuti workshop pemilik, pimpinan RS, Komite Medik, Komite Keperawatan dan Tim Pokja Akreditasi rumah sakit tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1.1 sebanyak 2 orang.
- Mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) SPIP Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 3 orang.
- Mengikuti workshop K3 rumah sakit sebanyak 8 orang.
- Mengikuti diklat EWS dan code blue sistem sebanyak 60 orang.

- Mengikuti sosialisasi dan pelatihan Asuhan Keperawatan sesuai SNARS 1 sebanyak 20 orang.
- Mengikuti diklat in house training manajemen nyeri sebbanyak 31 orang.
- Mengikuti seminar tentang pra eklamsi berat (PEB) sebanyak 90 orang.
- Mengikuti diklat in house training PMKP sebanyak 50 orang.
- Mengikuti in house training point of care testing (POCT) sebanyak 50 orang.
- Mengikuti pelatihan Sistem Manajemen Akreditasi (Sismadak) rumah sakit sebanyak 25 orang.

Perhitungan Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai standar pada tahun 2019 adalah :

RUMUS :

Jml pegawai yang harus memiliki STR + Jml pegawai RS yg akan mengikuti diklat, sos, workshop dan BimtekX100%

2

$$\frac{99,61 + 152,56}{2} \times 100\% = 126,09 \%$$

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa untuk komponen Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai standar RSUD dr. Achmad Darwis pada tahun 2019 adalah sebesar 126,09 %.

Dokumentasi Kegiatan Sumber Daya Rumah Sakit Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Tahun 2019 :

Gambar 3

Dokumentasi Diklat Survey Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2019



Gambar 4
Dokumentasi Diklat Akreditasi Snars Edisi 1 Tahun 2019



Gambar 5
Dokumentasi Diklat Bantuan Hidup Dasar (Bhd) Tahun 2019



3. Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standart

- Sarana

Sarana yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis ada sebanyak 8 gedung pelayanan, menurut Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, sarana yang tertuang sebanyak 13 gedung pelayanan, jadi ada kekurangan 5 gedung pelayanan menurut standar Permenkes tersebut.

Sarana yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis (8 Gedung Pelayanan) tersebut belum memenuhi atau mencukupi standar Permenkes, seperti gedung Laboratorium, gedung Radiologi, Gedung Gizi, Gedung Pemulasaran Jenazah sehingga capaian bobot sarana sampai akhir tahun 2019 di RSUD dr. Achmad Darwis adalah **71,62%**.

Kondisi saat ini ada 6 gedung lama yang tidak sesuai standart yang sudah harus direnovasi atau direhab sebagaimana tertuang dalam masterplan RSUD dr. Achmad Darwis.

Dokumentasi Kegiatan Sumber Daya Rumah Sakit Pengadaan Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Tahun 2019 :

Gambar 6

Dokumentasi Pengadaan Gedung Instalasi Laundry Tahun 2019



Gambar 7

Dokumentasi Pengadaan Gedung Instalasi Farmasi Tahun 2019



- Prasarana

Prasarana menurut Permenkes Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit adalah 23 unit, sedangkan prasarana yang telah ada di RSUD dr. Achmad Darwis sekarang adalah 15 unit, jadi kekurangan prasarana sampai saat ini adalah 8 unit. Prasarana yang ada saat ini di RSUD dr. Achmad Darwis ada beberapa yang menumpang pada gedung pelayanan yang lain seperti IPSRS berada di gedung Gizi, Kesling berada di gedung poliklinik lama, sesuai daftar analisa. Kondisi prasarana RSUD dr. Achmad Darwis sesuai standart tahun 2019 adalah **61,97%**.

- Alat Kesehatan

Menurut Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 total alat kesehatan yang ada sebanyak 1.095 unit alat kesehatan, sedangkan alat kesehatan yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis saat ini 640 unit alat kesehatan yang sesuai standart Permenkes tersebut. Sehingga masih banyak jenis alat kesehatan sesuai standart yang belum ada di RSUD dr. Achmad Darwis, dapat dilihat kekurangan alat kesehatan sebanyak 469 unit di setiap ruangan pelayanan yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis.

Kondisi alat kesehatan yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis sampai tahun 2019 adalah **58,44%**.

Perhitungan :

$$\frac{640}{1.095} \times 100 = 58,44\%$$

Kondisi alat kesehatan yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis saat ini \pm 15% diantaranya adalah alat lama yang sudah tidak harus diganti dengan alat baru dengan teknologi yang baru karena dari fungsinya banyak tidak terpakai lagi oleh user secara maksimal disebabkan karena sering rusak. Ketika diperbaiki oleh tenaga IPSRS tidak bertahan lama, jadi secara ekonomis juga tidak efisien lagi.

Gambar 8
Dokumentasi Pengadaan Alkes Patient Monitor Tahun 2019



Gambar 9
Dokumentasi Pengadaan Alkes Mesin Anestesi Tahun 2019



Gambar 10
Dokumentasi Pengadaan Alkes Usg 3d Tahun 2019



Perhitungan Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standart pada tahun 2019 adalah :

RUMUS :

$$\frac{\text{Persentase sarana} + \text{Persentase prasarana} + \text{Persentase alat kesehatan}}{3} \times 100$$
$$\frac{71,62 + 61,97 + 58,44}{3} \times 100\% = 64,01\%$$

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa untuk komponen Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar RSUD dr. Achmad Darwis pada tahun 2019 adalah sebesar 64,01 %.

Adapaun kegiatan tahun 2019 yang mendukung keberhasilan untuk terpenuhinya sumber daya rumah sakit yaitu persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan : Pengadaan alat – alat rumah sakit.
- b. Kegiatan : Pembangunan gedung Instalasi Laundry.
- c. Kegiatan : Pembangunan gedung Instalasi Farmasi.

Sedangkan untuk Komponen Pengadaan obat dan Sumber Daya Manusia (SDM) rumah sakit kegiatannya berada pada anggaran BLUD RSUD dr. Achmad Darwis

pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun 2019 adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan : Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD (Belanja Obat – obatan).
- b. Kegiatan : Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD (Pendidikan dan pelatihan /Diklat).

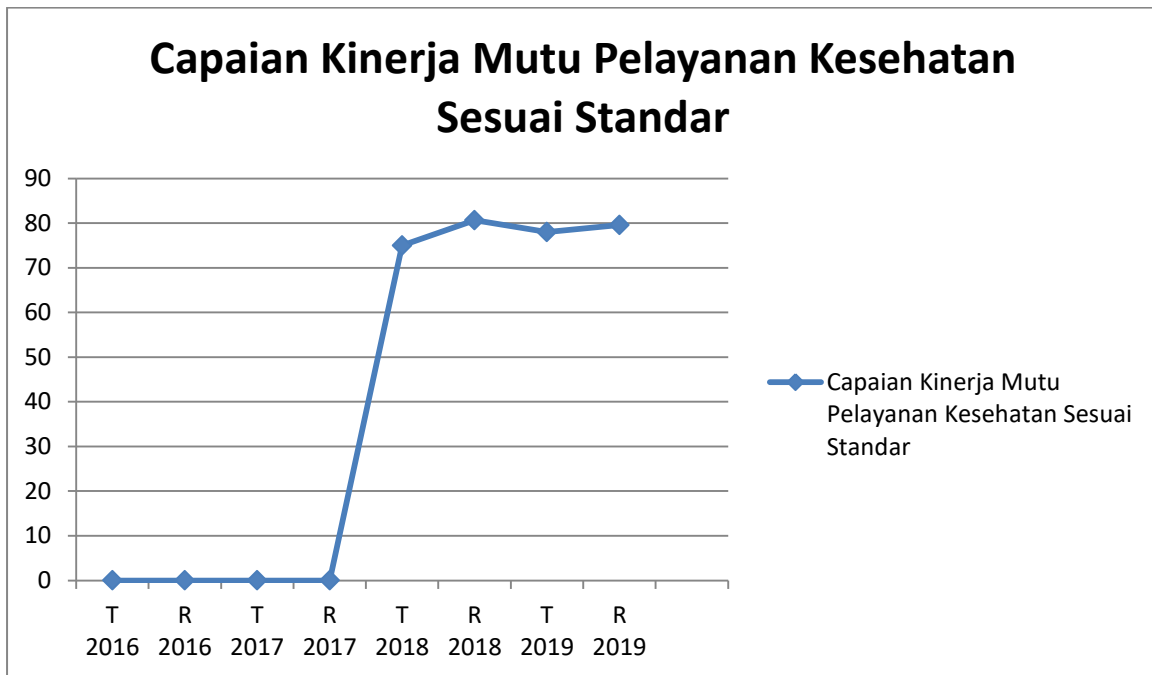
1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Tabel 10
Capaian Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	T	R	T	R	T	R 2018	T 2019	R 2019	Ket
			2016	2016	2017	2017	2018				
1	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target		-	-	-	-	75%	80,65 %	78	79,57%	

Adapun Grafik Capaian Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan sesuai Standar dari tahun 2016 – 2019 adalah sebagai berikut :

Gambar 11
Grafik Capaian Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan sesuai Standar



Dari Grafik Capaian Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di atas dapat dilihat bahwa Target tahun 2016 = 0 dan Realisasi tahun 2016 = 0, Target 2017 = 0 dan Realisasi tahun 2017 = 0, Target tahun 2018 = 75% dan Realisasi 2018 = 80,65% sedangkan untuk Target 2019 = 78% dan Realisasi = 79,57%.

Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target merupakan indikator yang diukur untuk menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Trend capaian persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target 78%.

Capaian persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target pada tahun 2019 sebesar %.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Achmad Darwis terdiri dari 22 jenis pelayanan dan 93 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Masing – masing Bidang dan Sekretariat mempunyai jenis pelayanan dan indikator standar pelayanan minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok

ukur layanan minimal yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat. RSUD dr. Achmad Darwis telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Layanan Umum daerah RSUD dr. Achmad Darwis, Berlaku untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

RSUD dr. Achmad Darwis memiliki 22 jenis pelayanan dan 93 indikator pelayanan SPM. Pada masing – masing bidang dan sekretariat memiliki berbeda beda jumlah jenis layanan dan indikator layanan sesuai dengan tupoksi masing – masing bidang dan sekretariat. Pembagian jenis pelayanan dan indikator pelayanan pada masing – masing bidang yaitu sekretaris dengan 2 jenis pelayanan dan 11 indikator pelayanan, bidang sarana, prasarana dan logistik dengan 4 jenis pelayanan dan 10 indikator pelayanan, bidang pelayanan medis dan keperawatan dengan 8 jenis pelayanan dan 44 indikator pelayanan, sedangkan untuk bidang penunjang dan promosi pengembangan rumah sakit dengan 8 jenis pelayanan dan 28 indikator pelayanan.

Dari penjelasan di atas, didapat perhitungan persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing – masing bidang dan sekretariat adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - Jumlah seluruh indikator pelayanan SPM = 11
 - Jumlah indikator pelayanan SPM yang mencapai target = 10
2. Bidang Sarana, prasarana dan Logistik
 - Jumlah seluruh indikator pelayanan SPM = 10
 - Jumlah indikator pelayanan SPM yang mencapai target = 7
3. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan
 - Jumlah seluruh indikator pelayanan SPM = 44
 - Jumlah indikator pelayanan SPM yang mencapai target = 37
4. Bidang Pelayanan Penunjang dan Promosi Pengembangan Rumah Sakit
 - Jumlah seluruh indikator pelayanan SPM = 28
 - Jumlah indikator pelayanan SPM yang mencapai target = 20

Sehingga jumlah seluruh indikator pelayanan SPM RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2019 sebanyak 93 indikator, sedangkan jumlah indikator pelayanan SPM yang mencapai target sebanyak 74 indikator dan indikator pelayanan SPM yang tidak mencapai target sebanyak 19 indikator.

Tabel 11
Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2019.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Analisa	Ket
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan gawat darurat yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan gawat darurat yang mencapai target	8 indikator	7 indikator		Dari 8 indikator target yang terealisasi sebanyak 7 indikator 7/8 X100 = 87,50%	
1. Jenis Pelayanan Gawat Darurat						
	1. Kemampuan menangani life saving	100%	100%	Tercapai	Semua pasien gawat darurat yang membutuhkan life saving yang datang ke IGD sudah mendapatkan pelayanan life saving	
	2. Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam	100%	100%	Tercapai	Instalasi gawat darurat buka 24 jam setiap hari	
	3. Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD	93%	100%	Tercapai	Semua tenaga yang memberikan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat semua sudah bersertifikat kegawatdaruratan	
	4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu Tim	Satu Tim	Tercapai	Sudah terbentuk satu tim penanggulangan bencana	
	5. Waktu tanggap pelayanan	2 menit	1,5 menit	Tercapai	Sudah terselenggaranya	

	dokter di gawat darurat 5 menit				pelayanan yang cepat, responsive untuk menyelamatkan pasien gawat darurat	
	6. Kepuasan pelanggan pada gawat darurat	86%	80,70%	Tidak Tercapai	Untuk standar permenkes sudah mencapai target yaitu 80% untuk kepuasan pelanggan tetapi untuk standar rumah sakit tidak tercapai target, hal ini disebabkan Masih adanya keluhan pasien sehubungan waktu menunggu hasil pemeriksaan penunjang, hal ini ke depan harus ditindak lanjuti dengan evaluasi pemberian edukasi dan komunikasi yang efektif dan evaluasi hambatan komunikasi sesuai kondisi masyarakat.	
	7. Kematian pasien ≤ 24 jam	5 ‰	4,65 ‰	Tercapai	Berdasarkan target SPM yang ditetapkan RSUD dr. Achmad Darwis yaitu 5/1000, kematian pasien ≤ 24 jam di IGD sudah memenuhi standar. Sedangkan menurut standar Kemenkes yaitu ≤ 2/1000 belum tercapai	

					target, hal ini disebabkan karena : 1. Mengingat RSUD dr. Achmad Darwis adalah RS rujukan khususnya daerah Lima Puluh Kota dimana kasus yang datang ke IGD adalah kasus yang berat. 2. Adanya pemahaman masyarakat bahwa mereka akan dirawat bila penyakitnya sudah parah. 3. Untuk kasus berat dengan kondisi harus dirujuk ke fasilitas lebih lengkap keluarga sering menolak karena alasan tidak ada biaya keluarga yang menunggu	
	8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	Tercapai	Sudah tidak ada pasien yang diharuskan menyerahkan uang muka kepada rumah sakit sebagai jaminan terhadap pertolongan medis yang diberikan	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan rawat jalan yang	6 indikator	4 indikator		Dari 6 indikator target yang terealisasi sebanyak 4 indikator	

elayanan rawat jalan yang mencapai target	mencapai target					$4/6 \times 100 = 66,67\%$
2. Jenis Pelayanan Rawat Jalan						
	1. Pemberi pelayanan di poliklinik spesialis	97%	100%	Tercapai	Poliklinik pelayanan rawat jalan di RSUD dr. Achmad Darwis sudah dilayani oleh tenaga dokter spesialis	
	2. Ketersediaan pelayanan rawat jalan	100%	100%	Tercapai	Sudah tersedia pelayanan rawat jalan spesialistik yang minimal harus ada di rumah sakit	
	3. Jam buka pelayanan 08.00 s/d 13.00 WIB setiap hari kerja kecuali Jum'at 08.00 s/d 11.00 WIB	100%	100%	Tercapai	Jenis-jenis pelayanan rawat jalan spesialistik sudah buka sesuai ketentuan pelayanan	
	4. Waktu tunggu di rawat jalan 60 menit	≤ 60 menit	169 menit	Tidak Tercapai	Waktu tunggu pelayanan di poliklinik pada beberapa pelayanan belum mencapai standar yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya : a. Belum terpenuhinya jumlah dokter spesialis pada suatu jenis layanan b. Sebagian tenaga dokter spesialis masih	

					<p>tenaga referal dari RS lain, yang kedatangannya setelah selesai kegiatan di RS asal</p> <p>c. Adanya kondisi - kondisi khusus pasien yang mengharuskan dokter terlebih dahulu harus melayani pasien di rawat inap, ICU atau kamar operasi</p> <p>d. Keterbatasan jumlah sopir yang dikhususkan untuk penjemputan dokter spesialis saraf dari Bukittinggi yang kadang pelayanan terlambat dimulai</p> <p>e. Sistem pendaftaran dan pencarian status rekam medik pasien kadang masih terkendala karena persoalan jaringan internet</p>	
	5. Kepuasan pelanggan	86%	80,08%	Tidak Tercapai	Hasil masih dibawah standar hal ini disebabkan karena masih tingginya waktu tunggu pasien di	

					rawat jalan dengan kendala sebagaimana diuraikan di atas	
	6. Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategis DOTS	100%	100%	Tercapai	Sudah tercapai (Sesuai standar), semua pasien TBC yang datang sudah ditangani dengan sistem DOTS	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan rawat inap yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan rawat inap yang mencapai target	10 indikator	9 indikator		Dari 10 indikator target yang terealisasi sebanyak 9 indikator 9/10 X100 = 90%	
3. Jenis pelayanan Rawat Inap						
	1. Pemberi pelayanan di rawat inap	100%	100%	Tercapai	Pemberi pelayanan rawat inap adalah dokter spesialis, dokter umum dan perawat yang kompeten minimal D3	
	2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%	Tercapai	Semua pasien yang dirawat sudah mempunyai penanggung jawab pelayanan dokter	
	3. Ketersediaan pelayanan rawat inap	100%	100%	Tercapai	Semua pelayanan yang ditargetkan sudah dapat diberikan	
	4. Jam visite Dokter Spesialis 08.00 s/d 14.00	100%	100%	Tercapai	Visite dokter spesialis sudah dilakukan setiap	

	setiap hari kerja				hari kerja sesuai dengan ketentuan kepada pasien yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan antara jam 8.00 sampai dengan 14.00 WIB	
	5. Kejadian infeksi pasca operasi	$\leq 1,5\%$	0,38%	Tercapai	Jumlah pasien yang mengalami infeksi pasca operasi yaitu 0,38 %, sudah dibawah standar maksimal yang ditetapkan, artinya pelaksanaan langkah-langkah pengendalian pencegahan infeksi sudah berjalan dengan baik	
	6. Angka kejadian infeksi nosokomial	$\leq 1,5\%$	0,34%	Tercapai	Jumlah pasien yang mengalami infeksi nosokomial yaitu 0,34 %, sudah dibawah standar maksimal yang ditetapkan $\leq 1,5\%$, artinya pelaksanaan langkah-langkah pengendalian pencegahan infeksi sudah berjalan dengan baik	
	7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh	100%	100%	Tercapai	Tidak adanya pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian artinya asesmen resiko jatuh dan pencegahan resiko jatuh sudah	

					dijalankan	
	8. Kematian pasien > 48 jam	$\leq 0,24\%$	2,02%	Tidak Tercapai	Kematian pasien > 48 jam diatas standar ini disebabkan oleh antara lain : a. pasien tidak bersedia dirujuk b. pasien yang masuk dengan penyakit komplikasi c. Pasien yang masuk adalah pasien terminal	
	9. Kejadian pulang paksa	$\leq 5\%$	3,19%	Tercapai	Kejadian pulang atas permintaan pasien atau keluarga sebelum diperbolehkan pulang oleh dokter kasusnya masih ada tapi dengan jumlah yang masih kecil dari standar maksimal yang ditetapkan, yang biasanya dapat disebabkan oleh kendala keluarga untuk menunggu pasien di RS	
	10. Kepuasan pelanggan	$\geq 85\%$	96,20%	Tercapai	Perasaan puas dari pelanggan terhadap pelayanan di rawat inap yang disampaikan melalui survei kepuasan sudah memenuhi standar	

Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan bedah yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan bedah yang mencapai target	7 indikator	6 indikator		Dari 7 indikator target yang terealisasi sebanyak 6 indikator 6/7 X100 = 85,71%	
4. Jenis pelayanan Bedah						
	1. Waktu tunggu operasi efektif	≤ 2 hari	> 2 hari (66 jam)	Tidak Tercapai	Kendala dokter spesialis anestesi tidak setiap hari (Masa bakti PGDS/WKDS spesialis anestesi telah berakhir, dokter untuk penempatan periode Tenggang waktu tunggu untuk operasi yaitu dari pasien dirawat /diinapkan, tenggang waktu tunggu untuk operasi yang terencana rata-rata selama 2 hari.	
	2. Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %	0,003%	Tercapai	Ada kejadian kematian di meja operasi pada saat operasi berlangsung yang diakibatkan tindakan anestesi maupun pembedahan 0,003 % dimana masih dibawah standar yang ditetapkan.	
	3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	Tercapai	Tidak ada kejadian operasi salah sisi artinya program	

					sasaran keselamatan pasien sudah dijalankan dikamar operasi.	
	4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	Tercapai	Tidak ada kejadian operasi salah orang artinya program sasaran keselamatan pasien sudah dijalankan dikamar operasi.	
	5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	Tercapai	Tidak ada kejadian operasi salah tindakan operasi artinya program sasaran keselamatan pasien sudah dijalankan dikamar operasi.	
	6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	Tercapai	Tidak ada kejadian tertinggal benda asing pada tubuh pasien artinya program sasaran keselamatan pasien sudah dijalankan dikamar operasi.	
	7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube	≤ 6%	0%	Tercapai	Tidak ada Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube artinya program sasaran keselamatan	

					pasien sudah dijalankan dikamar operasi.	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan persalinan dan perinatologi yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan persalinan dan perinatologi yang mencapai target	7 indikator	6 indikator		Dari 7 indikator target yang terealisasi sebanyak 6 indikator 6/7 X100 = 85,71%	
5. Jenis pelayanan Persalinan dan Perinatologi						
	1. Kejadian kematian ibu karena persalinan a. Perdarahan $\leq 1\%$	$\leq 1\%$	0%	Tercapai	Tidak ada kejadian kematian ibu melahirkan karena perdarahan yang terjadi pada saat semua kala persalinan dan nifas	
	b. Pre-eklampsia	$\leq 30\%$	0%	Tercapai	Tidak ada kejadian kematian ibu melahirkan karena preeklamsi dan eklamsi	
	c. Sepsis	$\leq 0,2\%$	0%	Tercapai	Tidak ada kejadian kematian ibu melahirkan karena sepsis	
	2. Pemberi pelayanan persalinan normal	100%	100%	Tercapai	Semua Pemberi pelayanan persalinan normal adalah Dokter Sp. OG, bidan yang sudah terlatih.	

	3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	100%	100%	Tercapai	Sudah tersedia Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit yaitu tim PONEK yang terdiri Dokter Sp.OG, dokter umum terlatih, bidan dan perawat yang sudah terlatih sudah tersedia, namun jumlah yang dilatih harus terus ditingkatkan	
	4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	100%	100%	Tercapai	Tercapai sesuai standar	
	5. Kemampuan menangani BBLR 1500 – 2500 gr	95%	100%	Tercapai	Tercapai sesuai standar	
	6. Pertolongan persalinan melalui seksio caseria	37%	41,90%	Tidak Tercapai	Pertolongan Persalinan melalui seksio cesaria masih diatas standar yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena RSUD dr. Achmad Darwis adalah RS rujukan tingkat dari fasilitas tingkat pertama sehingga kasus persalinan yang masuk ke RSUD dr. Achmad Darwis adalah kasus yang sudah dengan penyulit dan tidak bisa ditangani di fasilitas tingkat	

					pertama	
	7. Kepuasan pelanggan	85%	92,00%	Tercapai	pernyataan puas pasien atas pelayanan persalinan sudah memenuhi standar artinya pelayanan persalinan yang diberikan sudah sesuai harapan pasien	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan intensif yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan intensif yang mencapai target	2 indikator	1 indikator		Dari 2 indikator target yang terealisasi sebanyak 1 indikator 1/2 X100 = 50%	
6. Jenis pelayanan Intensif						
	1. Rata – rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3%	0,50%	Tercapai	Pasien yang kembali ke ruangan rawat intensif dari ruang rawat inap dengan kasus yang kecil dari nilai maksimal yang diperbolehkan	
	2. Pemberi pelayanan unit intensif	88%	65%	Tidak Tercapai	Pendidikan dan pelatihan akan dilakukan secara bertahap dengan melihat ketersediaan anggaran. Dan pada tahun 2019 karena kebutuhan	

					peayanan ada rotasi tenaga dari unit intensif	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan radiologi yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan radiologi yang mencapai target	4 indikator	1 indikator		Dari 4 indikator target yang terealisasi sebanyak 1 indikator 1/4 X100 = 25%	
7. Jenis Pelayanan Radiologi						
	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax	≤ 3 jam	3,56 jam	Tidak Tercapai	Hal ini disebabkan karena pelayanan radiologi di RSUD dr. Achmad Darwis berlangsung 24 jam dengan jadwal dinas petugas radiografer dibagi atas 3 shift. - Pagi = jam 8.00 – 14.00 - Sore = 14.00 – 20.00 - Malam = 20.00 – 8.00 Sedangkan dokter spesialis radiologi hanya 1 orang dengan jadwal dinas pagi saja.	
	2. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen sama	90%	81,71%	Tidak tercapai	Hal ini disebabkan karena pelayanan radiologi di	

	dr. Sp Radiologi				<p>RSUD dr. Achmad Darwis berlangsung 24 jam dengan jadwal dinas petugas radiografer dibagi atas 3 shift.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagi = jam 8.00 – 14.00 - Sore = 14.00 – 20.00 - Malam = 20.00 – 8.00 <p>Sedangkan dokter spesialis radiologi hanya 1 orang dengan jadwal dinas pagi saja.</p> <p>Rontgen yang dilakukan diluar jadwal dinas dokter spesialis radiologi, ekspertise baru bisa dilakukan keesokan harinya.</p>	
	3. Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	≤ 2 %	2,46 %	Tidak Tercapai	Hal ini terjadi karena adanya permasalahan pada prosesor yang error sehingga hasil rontgen menjadi blur, penyebabnya adalah pasien yang kooperatif terutama pasien anak-anak sehingga hasil tidak sesuai.	
	4. Kepuasan pelanggan	86%	86%	Tercapai	Untuk meningkatkan	

					kepuasan pasien terhadap layanan instalasi radiologi, petugas hendaknya bekerja dengan sopan, ramah, berkomunikasi dengan baik serta bekerja dengan terampil sesuai dengan SOP	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan laboratorium patologi klinik yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan laboratorium patologi klinik yang mencapai target	6 indikator	3 indikator		Dari 6 indikator target yang terealisasi sebanyak 3 indikator $3/6 \times 100 = 50\%$	
8. Jenis Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik						
	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium (kimia darah dan darah rutin)	140 menit	125,84 menit	Tercapai	Pencapaian waktu tunggu pasien yaitu 125,84 menit	
	2. Pelaksana ekspertisi dr. Sp.PK	100%	61,21%	Tidak Tercapai	Hal ini disebabkan karena dokter spesialis patologi klinik hanya 1 orang sementara instalasi laboratorium buka pelayanan 24 jam sehingga untuk pasien yang dilayani malam hari terkadang tidak dilakukan ekspertise	
	3. Kejadian kegagalan	9%	0%	Tercapai	Kejadian kegagalan	

	elayanan laboratorium				elayanan laboratorium tidak pernah terjadi pada tahun 2019	
	4. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	99,99%	Tidak Tercapai	Adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium sehingga tercapai 99,99%	
	5. Kalibrasi alat laboratorium tepat waktu	96%	0%	Tidak Tercapai	Kalibrasi alat laboratorium tidak terlaksana pada tahun 2019, perlu menjadi catatan penting bagi petugas IPSRS untuk melakukan kalibrasi alat dengan BPFK Medan sesuai dengan aturan yang berlaku (Untuk intern kalibrasi alat dilakukan setiap hari)	
	6. Kepuasan pelanggan	78%	85%	Tercapai	Kepuasan pelanggan untuk laboratorium tercapai target	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan rehabilitasi medik yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan rehabilitasi medik yang mencapai target	3 indikator	3 indikator		Dari 3 indikator target yang terealisasi sebanyak 3 indikator 3/3 X100 = 100%	
9. Jenis pelayanan Rehabilitasi Medik						
	1. Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan	≤ 50%	0%	Tercapai	Tidak ada kejadian drop out pasien terhadap	

	rehabilitasi medik yang direncanakan				peayanan rehabilitasi medik yang direncakan , sehingga terealisasi 0%	
	2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	Tercapai	Tidak ada kejadian kesalahan dalam melakukan tindakan rehabilitasi medik sehingga teralisasi 100%	
	3. Kepuasan pelanggan	80%	86%	Tercapai	Kepuasan pelanggan untuk pelayanan rehabilitasi medik terealisasi 86%	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan farmasi yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan farmasi yang mencapai target	5 indikator	5 indikator		Dari 5 indikator target yang terealisasi sebanyak 5 indikator 5/5 X100 = 100%	
10. Jenis Pelayanan Farmasi						
	1. Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 22 menit	13,66 menit	Tercapai	Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat jadi adalah 13,66 menit	

	2. Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 40 menit	30,80 menit	Tercapai	Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah 28,82 menit	
	3. Tidak adanya kesalahan pemberian obat	100%	100%	Tercapai	Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2019 tidak terjadi kesalahan pemberian obat pada pasien di instalasi farmasi yang dapat menimbulkan cedera atau kerugian pada pasien	
	4. Penulisan resep sesuai formularium	90%	90,31%	Tercapai	Hal ini terjadi karena ada beberapa obat yang dibutuhkan oleh pasien dan diresepkan oleh dokter penanggung jawab pelayanan yang tidak termasuk kedalam furnas tetapi masuk kedalam formularium rumah sakit.	
	5. Kepuasan pelanggan	83%	95,16%	Tercapai	Kepuasan pelanggan untuk pelayanan farmasi terealisasi 95,16%	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan gizi yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan gizi yang mencapai target	3 indikator	3 indikator		Dari 3 indikator target yang terealisasi sebanyak 3 indikator 3/3 X100 = 100%	

11. Jenis Pelayanan Gizi						
	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	90%	100%	Tercapai	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien sudah sesuai dengan SPO jadwal pendistribusian makanan sudah di tentukan jadwalnya, sehingga petugas sudah melakukan pendistribusian makanan sesuai dengan jadwal	
	2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 24%	16,06%	Tercapai	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien rata-rata 16,06%. Setiap petugas mengambil rantang kotor , petugas diharuskan mencatat makanan sisa dibuku register makanan sisa, sehingga sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien dapat dipantau	
	3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	Tercapai	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet, karena dalam pemberian makanan, pada setiap rantang selalu dibuat identitas pasien dan pada waktu penyerahan makanan disebutkan	

					kembali nama pasien untuk mencegah terjadinya kesalahan	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan transfusi darah yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan transfusi darah yang mencapai target	2 indikator	1 indikator		Dari 2 indikator target yang terealisasi sebanyak 1 indikator $1/2 \times 100 = 50\%$	
12. Jenis Pelayanan Transfusi Darah						
	1. Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi terpenuhi	88%	78,33%	Tidak Tercapai	Berdasarkan dari data yang ada, hampir semua permintaan darah dari ruangan sudah terpenuhi, hanya saja ada beberapa kasus dimana permintaan tidak sesuai dengan darah yang ditransfusikan, seperti pada kasus pasien operasi secsio, setelah dilakukan operasi dan tidak terjadi perdarahan maka tidak jadi darah tersebut ditransfusikan kepada pasien. Ada juga kasus pasien di ruang rawatan dimana permintaan dokter 5 kantong darah ternyata setelah ditransfusikan	

					darah ke pasien hanya 3 kantong, ternyata HB pasien sudah naik dan tidak perlu transfusi lagi	
	2. Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,03%	0%	Tercapai	Tidak ada kejadian reaksi tranfusi di RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2019. Kejadian reaksi transfusi adalah kejadian tidak diharapkan (KTD) yang terjadi akibat transfusi darah., dalam bentuk reaksi alergi, infeksi akibat transfusi hemolisi akibat golongan darah yang tidak sesuai atau gangguan sistem imun sebagai akibat pemberian transfusi darah.	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan GAKIN yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan GAKIN yang mencapai target	1 indikator	1 indikator		Dari 1 indikator target yang terealisasi sebanyak 1 indikator 1/1 X100 = 100%	
13. Jenis Pelayanan GAKIN						
	1. Pelayanan terhadap pasien Gakin yang datang ke rumah sakit pada setiap unit pelayanan	100%	100%	Tercapai	Sudah tercapai sesuai standar, dimana seluruh pasien gakin sudah dilayani sesuai dengan	

					prosedur pelayanan	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan rekam medik yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan rekam medik yang mencapai target	4 indikator	3 indikator		Dari 4 indikator target yang terealisasi sebanyak 3 indikator $3/4 \times 100 = 75\%$	
14. Jenis Pelayanan Rekam Medik						
	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 1 x 24 jam setelah selesai pelayanan	99%	98%	Tidak Tercapai	Hal ini terjadi karena masih ada poliklinik maupun ruang perawatan yang terlambat mengisi kelengkapan status rekam medisnya.	
	2. Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang jelas	96%	96,60%	Tercapai	Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang jelas, rata – rata adalah 96,60 belum 100% hal ini terjadi karena masih ada petugas yang belum melengkapi informed consent sebelum melakukan tindakan medis.	
	3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	9,6 menit	Tercapai	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan rata – rata adalah 9,6 menit	
	4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik	≤ 15 menit	14,6 menit	Tercapai	Waktu penyediaan dokumen rekam medik	

	elayanan rawat inap				elayanan rawat inap rata – rata adalah 14,6 menit	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan pengolahan limbah yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan pengolahan limbah yang mencapai target	2 indikator	2 indikator		Dari 2 indikator target yang terealisasi sebanyak 2 indikator 2/2X100 = 100%	
15. Jenis Pelayanan Pengolahan Limbah						
	1. Baku mutu Limbah Cair a. BOD b. COD c. TSS d. PH	<30 mg/ltr <80 mg/ltr <30 mg/ltr 6 - 9	4,55 mg/ltr 10,5 mg/ltr 16,0 mg/ltr 6,05	Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai	Pada tahun 2019 telah dilakukan 11 kali pemeriksaan yaitu bulan Januari s.d Desember 2019 Hasil yang dijadikan sampling adalah hasil pemeriksaan tanggal 23 Desember 2019. Dari 11 kali pemeriksaan yang dilakukan terdapat 66 parameter yang diperiksa dari 66 parameter tersebut terdapat 1 parameter yang tidak sesuai dengan baku mutu, yaitu hasil pemeriksaan tanggal 11 Februari 2019 yaitu parameter Zat tersuspensi (TSS) baku mutu 30 mg/ltr hasilnya yaitu 40 mg/ltr. (Laporan Hasil Uji dari	

					UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang).	
	2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	Tercapai	Tahun 2019 pengelolaan limbah padat sesuai dengan Permen LHK Nomor 56 Tahun 2015. RSUD dr. AD dalam melakukan pengolahan limbah padat mulai dari dihasilkan sampai pengolahan akhir oleh pihak ke tiga. Limbah padat diangkut ke tempat pengolahan limbah padat menggunakan transporter yang berbadan hukum dan telah melakukan Perjanjian kerjasama dengan RSUD dr. AD	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan administrasi dan manajemen yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan administrasi dan manajemen yang mencapai target	9 indikator	8 indikator		Dari 9 indikator target yang terealisasi sebanyak 8 indikator 8/9X100 = 88,89%	

16. Jenis Pelayanan Administrasi dan Manajemen						
	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan Direksi	97%	100%	Tercapai	Setiap selesai pertemuan langsung ditindaklanjuti oleh bidang terkait	
	2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	98%	100%	Tercapai	Seluruh dokumen tersedia	
	3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	Tercapai	Jml ASN yang naik pangkat = 43 orang	
	4. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	Tercapai	Jumlah ASN yang mengurus kenaikan Gaji Berkala = 127 orang	
	5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	50%	32,49%	Tidak Tercapai	jml seluruh pegawai 357 orang, jumlah pegawai yang mendapat diklat 116 orang $116/357 \times 100 = 32,49\%$	
	6. Cost Recovery	$\geq 40\%$	46,54%	Tercapai	Total Pendapatan = 23.423.444.667,33 Total Belanja = 50.325.914.280,00 Rumus : $\frac{23.423.444.667,33}{50.325.914.280,00} \times 100 = 46,54\%$	
	7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	Tercapai	Laporan selesai dibuat sebelum tanggal 10 setiap bulannya	
	8. Ketepatan waktu	≤ 2 jam	1 jam	Tercapai	Proses pembuatan	

	memberikan informasi tentang tagihan pasien rawat inap				administrasi dari ruang rawat inap dan UPAT	
	9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	80%	100%	Tercapai	Diberikan 4 kali setahun setiap per triwulan	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan ambulance/ mobil jenazah yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan ambulance/mobil jenazah yang mencapai target	3 indikator	3 indikator		Dari 3 indikator target yang terealisasi sebanyak 3 indikator 3/3X100 = 100%	
17. Jenis pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah						
	1. Waktu pelayanan ambulance/mobil jenazah	100%	100%	Tercapai	Waktu pelayanan di RSUD dr. Achmad Darwis adalah 24 jam	
	2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/mobil jenazah di rumah sakit	≤ 230 menit	30 menit	Tercapai	Jumlah kecepatan ambulance dalam memberikan pelayanan adalah 30 menit, sedangkan Jumlah pelayanan ambulance 24 jam pada tahun 2019 : - Jumlah pelayanan =462 - Jumlah pelayanan ambulance yang	

					diberikan = 459 $459/462 \times 100 = 99,35\%$	
	3. Waktu tanggap pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	Maks.1 jam	1 jam	Tercapai	Waktu tanggap pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan yaitu 1 jam, dimana setiap masyarakat yang membutuhkan ambulance langsung diberikan pelayanan setelah menyelesaikan administrasinya	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan pemulasaran jenazah yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan pemulasaran jenazah yang mencapai target	1 indikator	1 indikator		Dari 1 indikator target yang terealisasi sebanyak 1 indikator $1/1 \times 100 = 100\%$	
18. Jenis Pelayanan Pemulasaran Jenazah						
	1. Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah	≤ 2 jam	0%	Tercapai	Aktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah realisasi 0% karena memang tidak ada jenazah yang dilakukan pemulasarannya di RSUD dr Achmad Darwis. Semua pasien yang meninggal di RSUD dr Achmad Darwis langsung dibawa pulang	

					oleh keluarganya.	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan pemeliharaan sarana yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan pemeliharaan sarana yang mencapai target	3 indikator	1 indikator		Dari 3 indikator target yang terealisasi sebanyak 2 indikator $1/3 \times 100 = 33,33\%$	
19. Jenis pelayanan pemeliharaan sarana						
	1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	<80%	87,50%	Tercapai	Jumlah laporan alat yang masuk = 120 laporan Jumlah laporan yang ditanggapi kurang dari 15 menit = 105 laporan $105/120 \times 100\% = 87,50\%$	
	2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	90%	61,18%	Tidak tercapai	Jumlah pemeliharaan alat = 340 alat Jumlah pemeliharaan alat yang sesuai jadwal pemeliharaan = 208 $208/340 \times 100\% = 61,18\%$ Target ini tidak tercapai karena kurangnya tenaga ATEM yang ada di rumah sakit serta peralatan/alat kerja untuk petugas yang masih kurang	
	3. Peralatan laboratorium, elektromedik, alkes lain dan alat ukur yang	70%	0%	Tidak Tercapai	Jumlah alat yang harus dikalibrasi = 15 alat Jumlah alat yang	

	digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai ketentuan				dilakukan kalibrasi = $0/15 \times 100\% = 0\%$	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan laundry yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan laundry yang mencapai target	2 indikator	1 indikator		Dari 2 indikator target yang terealisasi sebanyak 1 indikator $1/2 \times 100 = 50\%$	
20. Jenis Pelayanan Laundry						
	1. Tidak ada kejadian linen yang hilang	100%	100%	Tercapai	Pengamatan dan laporan setiap bulan selama tahun 2019 tidak terdapat kejadian linen yang hilang	
	2. Ketepatan waktu untuk penyediaan linen ruang rawat inap	90%	82,90%	Tidak Tercapai	Pencapaian belum sesuai target dikarenakan keterbatasan fasilitas dan tenaga yaitu mesin cuci yang tersedia baru 1 unit dan tenaga laundry 3 orang sehingga tidak bisa melakukan tugas laundry secara optimal	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan PPI yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan PPI yang mencapai target	3 indikator	3 indikator		Dari 3 indikator target yang terealisasi sebanyak 3 indikator $3/3 \times 100 = 100\%$	

21. Jenis Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)						
	1. Ada anggota Tim PPI yang terlatih	70%	100%	Tercapai	Sudah tersedia tim PPI dan semua tim telah mengikuti pelatihan PPI	
	2. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) disetiap instalasi	≥ 60%	95,45%	Tercapai	Sebagian besar instalasi atau unit yang ada di RSUD dr.Achmad Darwis sudah menyediakan APD (95,45 %), namun perlu terus peningkatan sehingga di semua instalasi tersedia APD	
	3. Kegiatan surveilans infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di rumah sakit	≥ 75%	81,82%	Tercapai	Sudah dilakukan pencatatan dan pelaporan kasus infeksi nosokomial di sebagian besar instalasi	
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan keamanan yang mencapai target	Jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan keamanan yang mencapai target	2 indikator	2 indikator		Dari 2 indikator target terealisasi sebanyak 2 indikator 2/2 X 100 = 100%	
22. Jenis Pelayanan Keamanan						
	1. Petugas keamanan yang bersertifikat	100%	100%	Tercapai	Jumlah petugas keamanan yang memiliki sertifikat : 7 orang	
	2. Sistem Keamanan	Ada	Ada	Tercapai	Sistim pengamanan CCTV 24 jam dan 7 orang petugas keamanan	

Maka adapun perhitungan untuk persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target adalah sebagai berikut :

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah indikator SPM Rumah Sakit yang mencapai target}}{\text{Seluruh Indikator SPM Rumah Sakit}} \times 100\%$$

$$\frac{74}{93} \times 100 = 79,57\%$$

Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit mencapai target, dari target dari 78% terealisasi sebesar 79,57%.

Standar Pelayanan Minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan, karena indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas.

Adapun kegiatan tahun 2019 yang mendukung keberhasilan untuk meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai standar adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan : Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis.
- b. Kegiatan : Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu.

Dokumentasi Kegiatan Mutu Pelayanan Sesuai Standar RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2019 :

Gambar 12
Dokumentasi Pelayanan Poli Spesialis Mata



Gambar 13
Dokumentasi Pelayanan Poli Spesialis Penyakit Dalam



Gambar 14
Dokumentasi Pelayanan Rongent Di Instalasi Radiologi



Gambar 15
Dokumentasi Pelayanan Makan Pasien Di Instalasi Gizi



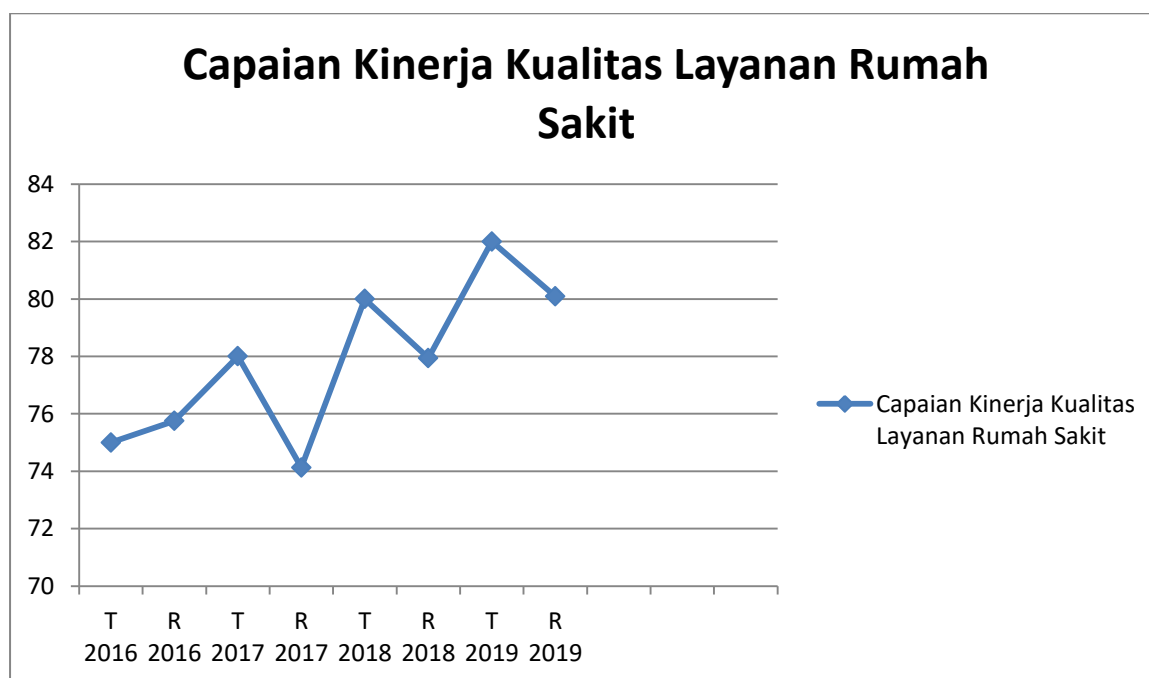
2. Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit

Tabel 12
Capaian Kinerja Kualitas Layanan Rumah Sakit

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	T 2016	R 2016	T 2017	R 2017	T 2018	R 2018	T 2019	R 2019	Ket
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		75%	75,75 %	78%	74,13 %	80%	77,94 %	82%	80,08 %	

Adapun Grafik Capaian Kinerja Kualitas Layanan Rumah Sakit dari tahun 2016 – 2019 adalah sebagai berikut :

Gambar 16
Grafik Capaian Kinerja Kualitas Layanan Rumah Sakit



Dari Grafik Capaian Kinerja Kualitas Layanan Rumah Sakit di atas dapat dilihat bahwa Target tahun 2016 = 75% dan Realisasi tahun 2016 = 75,75%, Target 2017 = 78% dan Realisasi tahun 2017 = 74,13%, Target tahun 2018 = 80% dan Realisasi 2018 = 77,94% sedangkan untuk Target 2019 = 82% dan Realisasi = 80,08%.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan kebutuhan pelanggan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan

tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif.

Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, meminimalkan biaya dan waktu serta memaksimalkan dampak pelayanan terhadap populasi sasaran. Terdapat beberapa cara untuk mengukur kepuasan pelanggan.

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan public, sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) maka perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Disamping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan melalui kegiatan survey kepuasan penerima pelayanan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan instrumen yang berbentuk Quisioner dengan alternatif jawaban yang sudah disediakan. Kegiatan survey ini dilakukan hampir disemua unit dilingkungan RSUD dr. Achmad Darwis, quisioner bisa diberikan langsung kepada pasien dan keluarga pasien untuk diisi atau dipandu pengisiannya oleh petugas melalui wawancara.

Menyadari hal tersebut maka RSUD dr. Achmad Darwis sebagai salah satu instansi pelayanan public dibidang kesehatan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota terus berupaya melakukan strategis untuk mendorong upaya perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan dengan mendorong semua jajaran memperbaiki kinerja, perbaikan SDM, perbaikan sarana prasarana dan perbaikan kualitas pelayanan.

Apabila hal ini tidak segera diupayakan perbaikannya maka akan dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap RSUD dr. Achmad darwis. yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Guna meningkatkan kinerja pelayanan publik maka pada tahap awal diperlukan adanya data-data tentang penilaian atas pendapat masyarakat terhadap kinerja pelayanan petugas melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat. Hal ini sesuai dengan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara No

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang kita berikan maka berdasarkan KEPMENPAN diatas maka masing-masing instansi pemerintah termasuk didalamnya pemerintah daerah Kabupaten/Kota diharapkan dapat melakukan penyusunan indeks kepuasan masyarakat.

Hasil penyusunan IKM ini akan dijadikan sebagai bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan sekaligus berfungsi sebagai pendorong bagi unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Kegiatan survey unit kerja pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan secara berkala. Adapun tujuan dari survey ini adalah:

1. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur pelayanan publik
2. Untuk memperbaiki kinerja pelayanan yang ada berdasarkan hasil analisis terhadap unsur pelayanan yang kinerjanya rendah
3. Sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Untuk memacu persaingan positif antara unit penyelenggara pelayanan dilingkungan Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota
5. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh petugas RSUD dr. Achmad Darwis.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2014 Tentang Pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah, maka responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 150 orang dari jumlah populasi penerima layanan dengan dasar $(\text{jumlah unsur} + 1) \times 10 = 150$ responden.

Proses pengumpulan data dilakukan pada lokasi sebagai berikut : Masing-masing unit di RSUD dr. Achmad Darwis yang terdiri dari ruang rawat inap, rawat

jalan, IGD, Gizi, Instalasi Farmasi, Radiologi dan Laboratorium serta unit lainnya dan dilakukan pada bulan Agustus 2019 oleh petugas yang ditunjuk.

Metode pengolahan data yang digunakan untuk mendapatkan nilai IKM adalah nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbangan yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bobot (1)}}{\text{Jumlah unsur (14)}} = 0.07143$$

Tertimbang untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi Per unsur}}{\text{Total unsur terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antar 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

Pengolahan data secara manual dilakukan sebagai berikut :

- Nilai rata-rata per unsur pelayanan

Nilai masing-masing untuk pelayanan dijumlahkan (kebawah) sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden .kemudian untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. Untuk mendapatkan nilai rata-rata pertimbang perunsur pelayanan , jumlah nilai rata-rata perunsur pelayanan dikalikan dengan 0.07143 sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang

- Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan 14 unsur dari nilai rata-rata tertimbang data jawaban dari masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner disusun dengan mengkomplikasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan jawaban yang diberikan sebagai bahan analisis obyektivitas.berdasarkan hasil perhitungan IKM , jumlah nilai dari

setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap pelayanan merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama yaitu 0,001743 dengan demikian nilai indeks unit pelayanan = nilai indeks dikalikan nilai konversi (25). Hasil nilai indeks unit pelayanan kemudian diklasifikasikan kedalam empat interval sebagai berikut :

Nilai 25.00-43.75 dikategorikan tidak baik

Nilai 43.76-62.50 dikategorikan kurang baik

Nilai 62.51-81.25 dikategorikan baik

Nilai 81.26-100.00 dikategorikan sangat baik

ANALISIS HASIL SURVEY

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan dilingkungan RSUD Ahmad darwis, suliki didasarkan jawaban responden terhadap 14 unsur pelayanan :

1. Prosedur pelayanan
2. Persyaratan pelayanan
3. Kejelasan petugas pelayanan
4. Kedisiplinan petugas pelayanan
5. Tanggung jawab petugas pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan
7. Kecepatan pelayanan
8. Keadilan mendapatkan pelayanan
9. Kesopanan dan keramahan petugas
10. Kewajaran biaya pelayanan
11. Kepastian biaya pelayanan
12. Kepastian jadwal pelayanan
13. Kenyamanan lingkungan
14. Keamanan pelayanan

Maka dapat dilaporkan hasil survey dan analisis sebagai berikut:

Tabel 13
 Hasil Survey dan Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI INDEKS	NILAI IKM KONVERSI
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)x0.071 43	(5)=(4)x25
1	Prosedur Pelayanan	3227	0,230	5,762
2	Persyaratan	3,167	0,226	5,655
3	Kejelasan petugas	3,200	0,229	5,714
4	Kedisiplinan petugas	3,193	0,228	5,702
5	Tanggung jawab petugas	3,253	0,232	5,810
6	Kemampuan petugas	3,280	0,234	5,857
7	Kecepatan	3,033	0,217	5,417
8	Keadilan mendapatkan pelayanan	3,153	0,225	5,631
9	Kesopanan dan keramahan petugas	3,227	0,230	5,762
10	Kewajaran biaya	3,180	0,227	5,679
11	Kepastian biaya	3,253	0,232	5,810
12	Kepastian jadwal	3,167	0,226	5,655
13	Kenyamanan lingkungan	3,240	0,231	5,786
14	keamanan	3,273	0,234	5,845
	Total Nilai IKM	44,847	3,203	80,083

Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat bahwa dari 14 unsur pelayanan yang ada ,nilai kinerja IKM terendah adalah unsur kecepatan pelayanan dengan angka 5,417 sedangkan nilai kinerja tertinggi adalah unsur kemampuan petugas dengan nilai 5,857 dan tanggung jawab petugas dengan angka 5,810. Dengan kondisi tersebut diatas disarankan agar dimasa yang akan datang perlu adanya standar prosedur operasional (SPO) yang jelas yang dilengkapi dengan pedoman pelayanan,panduan,alur pelayanan yang lengkap dan komitmen dengan semua petugas untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan standar pelayanan minimal RS. Disamping hal tersebut dapat juga dilakukan sosialisasi melalui media informasi,papan pengumuman tentang alur pelayanan dan denah ruangan karena keterlambatan pemberian pelayanan bisa juga terjadi karena pasien tidak paham

dengan alur pelayanan dan lokasi ruangan yang dituju . Untuk kemampuan petugas dan tanggung jawab petugas yang telah mendapatkan nilai kinerja IKM tertinggi menunjukkan adanya peningkatan dari sumber daya manusia artinya petugas yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat telah dipandang mampu oleh responden , sehingga hal ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 80,08%. Pada perjanjian kinerja RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2019 ditargetkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82%, namun dalam realisasinya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 80,08% maka IKM RSUD dr. Achmad Darwis tidak tercapai Target sebesar 1,92%.

Adapaun kegiatan tahun 2019 yang mendukung keberhasilan untuk meningkatnya kualitas layanan rumah sakit yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). Diantara kegiatannya adalah :

Metode pengolahan data yang digunakan untuk mendapatkan nilai IKM adalah nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbangan yang sama dengan rumus sebagai berikut:

- a. Kegiatan : Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

Dokumentasi Kegiatan Kualitas Layanan Rumah Sakit Tahun 2019 :

Gambar 17

Dokumentasi Pengawasan Prosedur Pelayanan Di Instalasi Gawat Darurat Tahun 2019



Gambar 18
Dokumentasi Pengawasan Prosedur Pelayanan Di Instalasi Farmasi Tahun 2019



Gambar 19
Dokumentasi Pengawasan Prosedur Pelayanan Di Rawat Inap Kebidanan Tahun 2019



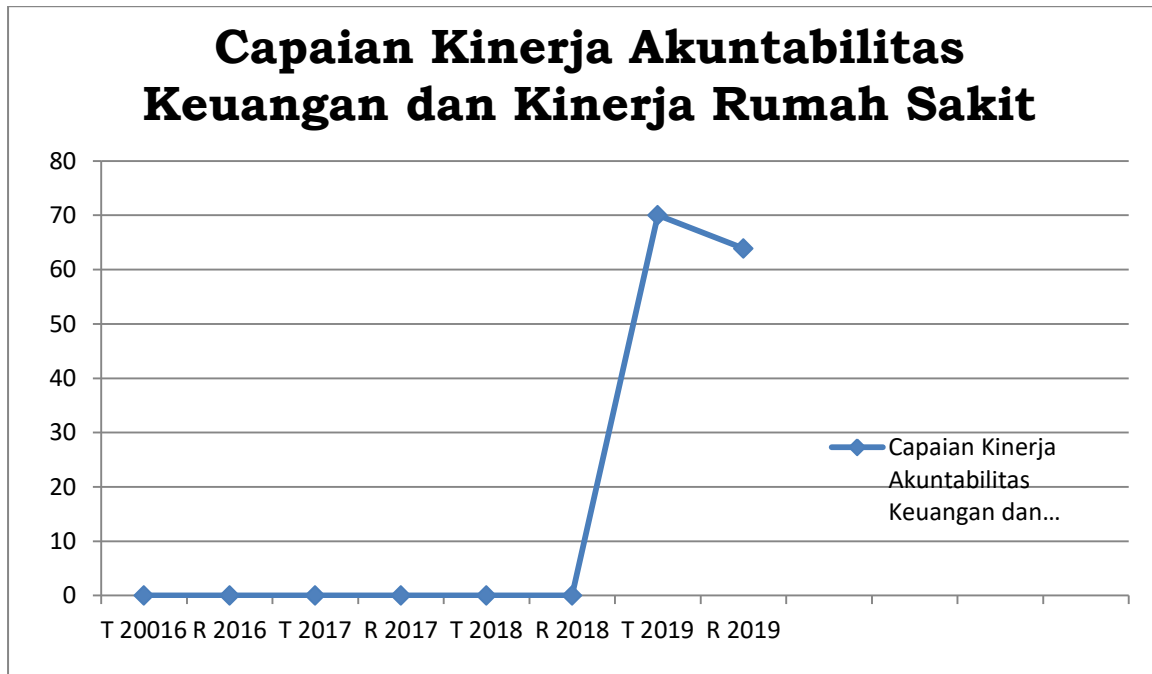
3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja Rumah Sakit

Tabel 14
Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	T 2016	R 2016	T 2017	R 2017	T 2018	R 2018	T 2019	R 2019	Ket
1	Nilai akuntabilitas kinerja rumah sakit		-	-	-	-	-	-	70%	63,89 %	

Adapun Grafik Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit dari tahun 2016 – 2019 adalah sebagai berikut :

Gambar 20
Grafik Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit



Dari Grafik Capaian Kinerja Kualitas Layanan Rumah Sakit di atas dapat dilihat bahwa Target tahun 2016 = 0 dan Realisasi tahun 2016 = 0, Target 2017 = 0 dan Realisasi tahun 2017 = 0, Target tahun 2018 = 0 dan Realisasi 2018 = 0 sedangkan untuk Target 2019 = 70% dan Realisasi = 63,89%.

Indikator ini adalah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja RSUD dr. Achmad Darwis oleh inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2019 tahun pembuatan 2020 memakai hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2018 tahun pembuatan 2019, jadi LkjIP yang menjadi Indikator untuk nilai akuntabilitas kinerja rumah sakit adalah LkjIP tahun 2018 yang telah dievaluasi oleh Inspektorat.

Saat ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2018 telah di evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 BLUD RSUD dr. Achmad Darwis memperoleh nilai **63,89%** dengan kategori **BAIK**

yaitu pengertiannya adalah Akuntabilitas Kinerja sudah BAIK, memiliki sitem yang dapat dipergunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Uraian hasil evaluasi atas masing – masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah :

A. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja meliputi evaluasi terhadap perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan menunjukkan perolehan nilai 20,87 atau 69,57% dari bobot sebesar 30% yang masuk kategori BAIK.

Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja, masih terdapat kelemahan – kelemahan sebagai berikut :

1. Target Kinerja sebagian belum relevan dengan kegiatan.
2. Renja Tahunan belum optimal dimanfaatkan dalam penyusunan Anggaran.
3. Rencana aksi belum optimal dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

B. Pengukuran Kinerja.

Evaluasi atas pengukuran kinerja meliputi evaluasi terhadap pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran menunjukkan perolehan nilai 14,38 atau 57,50% dari bobot 25% yang termasuk kategori CUKUP.

Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja, masih terdapat kelemahan – kelemahan sebagai berikut :

1. IKU yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen – dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan/ dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
3. Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala (bulanan/triwulan/semester) belum optimal.
4. Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi informasi.

C. Pelaporan Kinerja.

Evaluasi atas pelaporan kinerja meliputi evaluasi terhadap pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja

menunjukkan perolehan nilai 9,70 atau 64,64% dari bobot sebesar 15% yang termasuk kategori BAIK.

Hasil evaluasi atas pelaporan kinerja masih terdapat kelemahan – kelemahan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi ada yang belum sama pembandingnya sehingga persentase pencapaian tidak sesuai.
2. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
3. Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk peningkatn kinerja.

D. Evaluasi Internal.

Evaluasi atas evaluasi internal meliputi evaluasi terhadap Pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan perolehan nilai 5,33 atau 53,25% dari bobot sebesar 10% yang termasuk kategori CUKUP.

Hail evaluasi atas evaluasi internal, masih terdapat kelemahan – kelemahan sebagai berikut :

1. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum optimal dilaksanakan dan disampaikan kepada pihak – pihak yang berkementingan.
2. Belum ada pemantauan Rencana aksi sehingga belum bisa memberikan alternatif perbaikan setiap periode dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Evaluasi atas pencapaian sasaran / kinerja organisasi meliputi evaluasi terhadap kinerja yang dilaporkan baik input maupun output menunjukkan perolehan 13,08 atau 65,42% dari bobot sebesar 20% yang termasuk kategori BAIK.

Hasil evaluasi atas pencapaian sasaran/kinerja organisasi, masih terdapat kelemahan – kelemahan sebagai berikut :

1. Adanya indikator yang belum diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid oleh karena pembandingnya yang belum cocok.

Jawaban Hasil Rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja RSUD dr. Achmad Darwis oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota (APIP) adalah sebagai berikut :

- A. Target kinerja akan diupayakan relevan dengan kegiatan.
- B. Renja tahunan akan dioptimalkan dalam penyusunan anggaran.
- C. Rencana aksi akan dioptimalkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
- D. IKU akan di seleraskan dengan dokumen – dokumen perencanaan dan penganggaran.
- E. Capaian kinerja mulai dari eselon IV ke atas akan dikaitkan dengan pemberian *reward dan punishment*.
- F. Mengoptimalkan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala (bulanan/triwulan/semesteran).
- G. Menggunakan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja.
- H. Akan membandingkan target dan realisasi sehingga persentase pencapaian bisa diukur.
- I. Menyajikan laporan kinerja dengan efisiensi sumber daya.
- J. Informasi dan laporan kinerja akan digunakan dalam perbaikan perencanaan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan.
- K. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana aksi.
- L. Melaksanakan pemantauan rencana aksi dalam pengendalian kinerja.

Adapun kegiatan tahun 2019 yang mendukung keberhasilan untuk meningkatkannya akuntabilitas keuangan dan kinerja rumah sakit adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
- b. Kegiatan : Penyediaan administrasi keuangan.
- c. Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman.
- d. Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- e. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- f. Kegiatan : Penyusunan laporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

2.2.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan RSUD dr Achmad Darwis dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 15
Kinerja Keuangan RSUD dr Achmad Darwis tahun 2017 – 2019

	Target tahun 2017	Realisasi tahun 2017	%	Target tahun 2018	Realisasi tahun 2018	%	Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019	%
Pendapatan	18.375.000.000,00	19.603.887.819,00	106,68	22.384.867.000,00	21.851.611.148,00	97,62	23.084.867.000,00	23.423.444.667,33	101,5
Belanja	47.403.299.469,17	42.314.490.296,00	89,26	47.614.652.841,29	44.327.099.132,02	93,09	53.751.072.285,17	50.326.184.280,00	93,63
Belanja tdk Langsung	11.398.718.794,00	10.723.110.294,00	94,07	13.091.012.816,00	12.734.270.624,00	97,27	15.021.736.310,00	14.776.705.860,00	98,37
Belanja Langsung	36.004.580.675,17	31.591.380.002,00	87,74	34.523.640.025,29	31.592.828.508,02	91,51	38.729.335.975,17	35.549.478.420,00	91,79
- Belanja Pegawai	4.427.912.000,00	3.852.039.500,00	86,99	4.036.200.000,00	3.616.849.000,00	89,61	4.563.753.000,00	3.817.351.104,00	83,64
- Belanja Brg & Jasa	20.791.608.602,17	17.619.480.998,00	84,74	22.087.501.936,17	19.965.734.212,00	90,39	21.100.136.732,17	19.570.427.522,00	92,75
- Belanja Modal	10.785.060.073,00	10.119.859.504,00	93,83	8.399.938.089,12	8.010.245.296,02	95,36	13.065.446.243,00	12.161.699.794,00	93,08
Sulplus/ (Defisit)	(29.028.299.469,17)	(22.710.602.496,00)	78,24	(25.229.785.841,29)	(22.475.487.984,00)	89,08	(30.666.205.285,17)	(26.902.739.613,33)	87,73

Sumber : data keuangan RSUD dr Achmad Darwis Tahun 2019

Dari data diatas terlihat bahwa RSUD belum bisa membiayai belanja rutinnya karena masih defisit sebesar Rp 26.902.739.613,33 atau 87,73 % dari total belanja yang ada baik belanja tidak langsung, belanja langsung pegawai, barang jasa dan belanja modal. Akan tetapi apabila dilihat dari target kinerja pendapatan tahun 2019 yaitu Rp. 23.084.867.000,00 yang tercapai adalah Rp. 23.423.444.667,33 dengan capaian 101,5 %.

Diharapkan sekali perhatian Pemda terhadap RSUD dr. Achmad Darwis lebih meningkat karena selain rumah sakit bersifat sosial untuk masyarakat, rumah sakit juga bersifat ekonomis untuk masyarakat menengah keatas dengan pendapatan Rumah Sakit menjadi PAD tertinggi.

Untuk melengkapi standar pelayanan Kelas C yang terakreditasi SNARS, RSUD dr. Achmad Darwis yang harus dipenuhi RSUD adalah sarana dan prasarana.

Dari tahun 2012 beberapa pembangunan dibidang sarana dan prasarana yang telah dilakukan, yaitu :

1. Pembangunan gedung IGD PONEK tahun 2012.
2. Pembangunan gedung Perawatan ICU tahun 2014.
3. Pembangunan gedung Rawat Inap Penyakit Dalam tahun 2015.
4. Pembangunan gedung Poli Paru tahun 2015.
5. Pembangunan sarana air bersih tahun 2015.
6. Pembangunan Gedung Poliklinik bertingkat (Tingkat dua kantor) tahun 2016.
7. Pembangunan gedung rawat inap khusus paru tahun 2016.
8. Lanjutan pembangunan gedung perawatan ICU untuk NICU tahun 2016.
9. Drainase rumah sakit tahun 2017 (belum maksimal).
10. Pemagaran rumah sakit tahun 2017 (belum maksimal).
11. Pembangunan gedung Central Sterile Supply Departement (CSSD) tahun 2018.
12. Pembangunan gedung ruang kamar operasi tahun 2018 (belum representatif dan memenuhi standar akreditasi RS, karena hanya gedungnya saja peralatan dan asesoris untuk ruangan kamar operasi sebanyak 3 kamar belum terisi, sehingga gedung belum dapat digunakan untuk saat ini).
13. Pembangunan garase ambulance tahun 2018.

14. Pembangunan pembuatan paving block pekarangan rumah sakit tahun 2018 (belum maksimal).
15. Pembangunan rumah cold storage tahun 2018.
16. Pemeliharaan gedung kantor dan rawat inap lainnya setiap tahun anggaran.
17. Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi tahun 2019
18. Pembangunan Gedung Instalasi Laundry tahun 2019

Dalam melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana tidak hanya melengkapi sarana gedung saja, tetapi hal yang sangat penting adalah melengkapi alat kedokteran, alat labor, bahan habis pakai, obat-obatan, mobileur dan lainnya.

Diantara alat kedokteran dan alat kesehatan yang dilengkapi tahun 2014 sampai tahun 2019 adalah

1. Alat bedah Laparaskopi (OK) tahun 2014
2. Alat operasi mata Feco tahun 2014.
3. Alat Radiologi (X-Ray) tahun 2015
4. Mikroskop Mata (Kamar Operasi) tahun 2015
5. Eccokardiografi tahun 2015
6. Treadmill tahun 2015
7. ECG tahun 2015
8. Pasien monitor tahun 2015
9. Centrifuge (Laboratorium) tahun 2015
10. Hematologi (Laboratorium) tahun 2015
11. ECG, syringe pump, Infuse pump, Patient monitor,slip lamp,Endoscopy THT, Antrostomi THT, suction, CPAP, Ventilator bayi, Incubator Bayi,Blod Gas Analyzer pengadaan tahun 2016.
12. Generator Set (Genset, Bangunan Genset dan Panel Listrik) DAK tahun 2017.
13. Bed Head tahun 2017.
14. Meja Operasi tahun 2017.
15. Mesin Anastesi tahun 2017.
16. USG 4 Dimensi untuk Radiologi (Penyakit Dalam) tahun 2017
17. Emergency Trolley tahun 2017.
18. ECG tahun 2017.
19. Stretcher tahun 2017.

20. Oximeter tahun 2017.
21. Patient monitor tahun 2017.
22. Biometri tahun 2017.
23. Meja Pemeriksa tahun 2017.
24. Infant warmer tahun 2017.
25. Autoclave tahun 2017.
26. Kendaraan ambulance transport DAK tahun 2017.
27. Pesawat sinar-x dental panoramic tahun 2018.
28. Steam Autoclave tahun 2018.
29. Automatic processing tahun 2018.
30. Phototerapi tahun 2018.
31. Mesin antrian untuk pasien tahun 2018.
32. Mesin pendingin sampar (cold storage) tahun 2018.
33. Vena Detektor tahun 2018.
34. Suction tahun 2018.
35. Dopler tahun 2018.
36. Resusitasi bayi tahun 2018.
37. Patient monitor tahun 2018.
38. Patient monitor anak tahun 2018.
39. Inkubator transport tahun 2018.
40. Box bayi tahun 2018.
41. Meja mayo tahun 2018.
42. Mesin Anastesi tahun 2019
43. Pendan surgery tahun 2019
44. Pendan anastesi tahun 2019
45. Patient monitor tahun 2019
46. USG 3-4 Dimensi tahun 2019
47. Steam Sterilizer tahun 2019
48. Washer Desinfektan tahun 2019
49. Ultrasonic tahun 2019

Dalam melengkapi sarana, prasarana dan alat kesehatan/kedokteran rumah sakit sesuai dengan kebutuhan rumah sakit klas C dan standar rumah sakit terakreditasi

maka di tahun 2020 dilakukan Pengadaan Pembangunan dan Peralatan, antara lain :

1. Pengadaan pemasangan Modular Operating Theater (MOT)
2. Pembuatan Pagar Rumah Sakit
3. Pengadaan Alat Emergency Stretcher (DAK)
4. Pengadaan Alat Monitor For Laparascopy (DAK)
5. Pengadaan Alat Laparascopy (DAK)
6. Pengadaan Alat Gastrosocopy (DAK)
7. Pengadaan alat kesehatan/kedokteran lainnya (BLUD).
8. Perbaikan gedung – gedung di rumah sakit (BLUD).

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 16 (T-C.30)

Pencapaian Indikator Kinerja Utama RSUD dr. Achmad Darwis

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Rentra Perangkat Daerah/ RPJMD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Persentase sumber daya rumah sakit sesuaistandar	Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit	Terpenuhinya sumber daya rumah sakit	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%	87,98%	0	75,00%	75,00%	-
2	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target	Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No.129/Menkes/SK/II/2008 dan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Layanan Umum daerah RSUD dr. Achmad Darwis, Berlaku untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2021	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	78,00%	80,00%	82,00%	82,00%	79,57%	0	82,00%	82,00%	-
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sesuai dasar PermenPAN No. 16 Tahun 2014 dan Keputusan Menpan No. KEP/25.M.PAN/2/2004	Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	82,00%	85,00%	85,00%	85,00%	80,08%	0	85,00%	85,00%	-
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis oleh Inspektorat/ APIP di tahun N	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja rumah sakit	70,00%	75,00%	78,00%	78,00%	63,89%	0	78,00%	78,00%	-

Jadi berdasarkan data tabel Tabel 16 (T-C.30) dapat disimpulkan bahwa kinerja dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Achmad Darwis pada tahun 2019 ada beberapa indikator yang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Target = 82,00% terealisasi sebesar 80,00% dan Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit dari Target = 70,00% terealisasi sebesar 63,89%, namun ada Indikator Kinerja yang sudah memenuhi target, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Indikator : Persentase Sumber Daya Rumah Sakit Sesuai Standar dari Target = 65,00% terealisasi sebesar 87,98% dan Indikator : Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target dari Target = 78,00% terealisasi sebesar 79,57%.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD dr. Achmad Darwis

Kinerja RSUD dr.Achmad Darwis tahun 2019 secara umum baik, dengan memperhatikan indikator pencapaian sasaran kinerja pelayanan, kinerja pelayanan publik maupun kinerja keuangan, yang sekaligus merupakan indikator keberhasilan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Namun demikian untuk pencapaian optimal per-indikator pelayanan masih menemui beberapa hambatan dan permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah :

a. Faktor Internal

- Jenis dan jumlah SDM masih kurang.
- Tarif pelayanan rumah sakit sudah tidak sesuai tingkat kewajaran.
- Sarana, prasarana dan alat kesehatan di rumah sakit belum terpenuhi sesuai standar rumah sakit kelas C sehingga perlu adanya penambahan untuk gedung, kendaraan dan peralatan kesehatan/ kedokteran baik medik dan Non Medik (Permenkes 56 Tahun 2014).
- Pemagaran sekeliling rumah sakit dan pekarangan parkir rumah sakit.
- SIMRS masih belum optimal.
- Keamanan masih perlu ditingkatkan.
- Mutu pelayanan masih perlu ditingkatkan.

- Gedung kamar operasi yang belum bisa digunakan (alat kesehatan/kedokteran dan asesorir untuk 2 ruang/kamar operasi belum terisi sehingga gedung belum bisa dimanfaatkan/digunakan saat ini).
- b. Faktor Eksternal
 - Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota belum memanfaatkan rumah sakit secara maksimal, sebagian masih berobat ke kota.
 - Kurangnya perhatian Pemda dalam mengalokasikan anggaran untuk rumah sakit, sehingga rumah sakit masih mengandalkan anggaran dari DAK yang memiliki menu serta juklak dan Juknis khusus, padahal kebutuhan rumah sakit tidak tertaung dalam menu DAK tersebut.
 - Lokasi rumah sakit yang jauh dari pusat kota.
 - Transportasi yang kurang lancar.
 - Masih ada masyarakat kurang mampu tidak memiliki jaminan kesehatan.
 - Belum adanya kebijakan yang mengikat agar seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota mau menggunakan akses berobat ke RSUD dr. Achmad Darwis.

Berdasarkan permasalahan diatas jumlah SDM yang kurang merupakan masalah yang cukup mendasar dalam rangka peningkatan mutu layanan di rumah sakit. Menyikapi permasalahan ini kedepan perlu adanya penambahan sumber daya manusia di setiap bidang yang membutuhkan.

Permasalahan yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis yaitu masih kurangnya sarana, prasarana dan peralatan kesehatan. Kondisi sarana dan prasarana di RSUD dr Achmad Darwis saat ini adalah kurang refresentatifnya dan tidak memenuhi standar bangunan yang ada. Rata – rata bangunan yang ada sudah lama dan sudah harus dilakukan perbaikan dan renovasi bahkan dilakukan penambahan gedung baru. Saat ini sudah ada penambahan gedung baru dan perbaikan gedung – gedung yang rusak melalui anggaran APBD, DAK dan BLUD rumah sakit. Kedepan masih banyak yang harus diperbaiki dan pembangunan gedung baru diantaranya gedung Rekam Medis/Medical Record, penambahan ruang rawat inap, serta perbaikan gedung – gedung rumah sakit dikarenakan masih banyaknya gedung-gedung lama sesuai master plan rumah sakit.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di RSUD dr. Achmad Darwis sangat ditunjang oleh ketersediaan peralatan kesehatan/kedokteran, kondisi saat ini peralatan kedokteran yang tersedia belum memadai sehingga pelayanan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Adapun kebutuhan RSUD dr. Achmad Darwis yaitu peralatan kesehatan yang sangat dibutuhkan di RSUD dr. Achmad Darwis.

Sehubungan dengan isu-isu penting yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik bidang kesehatan rujukan, beberapa hal yang menjadi peluang sekaligus strategi untuk mengatasi permasalahan atau upaya peningkatan pelayanan adalah :

1. Tersedianya sumber daya yang memadai.
2. Menyusun usulan perubahan tarif melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
3. Tersedianya sarana dan prasarana di RSUD dr. Achmad Darwis
4. Tersedianya anggaran rumah sakit yang memadai.
5. Pembenahan manajemen keuangan RSUD dr. Achmad Darwis.
6. Terlaksananya pelaksanaan Akreditasi rumah sakit versi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) untuk tahun 2020 dengan lulus paripurna SNARS.
7. Adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan RSUD dr. Achmad Darwis oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah, DPRD dalam pengembangan rumah sakit sesuai master plan rumah sakit.
9. Adanya dukungan pemerintah Daerah untuk alokasi dana untuk pengadaan alat kesehatan dan asesoris 2 ruangan/kamar operasi agar dapat digunakan gedung kamar operasi yang dibangun tahun 2018.
10. Meningkatkan mutu pelayanan dan melakukan inovasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
11. Bekerjanya Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) dalam RSUD dr. Achmad Darwis.
12. Adanya upaya pemeliharaan keamanan dilingkungan RSUD dr. Achmad Darwis.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Tahap awal rancangan yang telah disusun pada RSUD dr. Achmad Darwis telah mengalami penyesuaian dengan perencanaan kinerja RSUD dr. Achmad Darwis. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Achmad Darwis. Disamping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada RSUD dr. Achmad Darwis.

Dalam pengajuan jumlah Pagu Anggaran yang dituangkan dalam RKPD belum merupakan Pagu Final melainkan masih bersifat sementara atau indikatif, hal ini ditetapkan dan disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga SKPD harus benar – benar memprioritaskan program kegiatan untuk tahun 2021.

Tabel 17 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	IKU	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Nilai akuntabilitas kinerja rumah sakit	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	78%	1.282.122.800,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	78%	809.220.000,00	
1		Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	RSUD AD	Jumlah pengadaan materi, peranko dan pengiriman surat kilat khusus	Materai 625 bh, peranko = 200 bh, surat kilat khusus = 1 th	4.000.000,00	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	RSUD AD	Jumlah pengadaan materi, peranko dan pengiriman surat kilat khusus	-	-	Kegiatan ini dialihkan ke RBA BLUD RS
2		Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD AD	Jumlah pembayaran rekening telepon, rekening air, rekening listrik dan langganan koran/ majalah	12 bulan	666.150.000,00	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD AD	Jumlah pembayaran rekening telepon, rekening air, rekening listrik dan langganan koran/ majalah	12 bulan	588.000.000,00	
3		Kegiatan pelayanan administrasi keuangan	RSUD AD	Jumlah pembayaran honorarium tim pelaksanaan kegiatan, honorarium tenaga PTTD rumah sakit dan belanja perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	228.013.000,00	Kegiatan pelayanan administrasi keuangan	RSUD AD	Jumlah pembayaran honorarium tim pelaksanaan kegiatan, honorarium tenaga PTTD rumah sakit dan belanja perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	171.800.000,00	
4		Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	RSUD AD	Jumlah alat tulis kantor rumah sakit	1 paket	102.326.000,00	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	RSUD AD	Jumlah alat tulis kantor rumah sakit	-	-	Kegiatan ini dialihkan ke RBA BLUD RS
5		Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan	RSUD AD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 paket	93.272.800,00	Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan	RSUD AD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	-	-	Kegiatan ini dialihkan ke RBA BLUD RS
6		Kegiatan penyediaan komp listrik /Penerangan kantor	RSUD AD	Jumlah komponen listrik/ penerangan kantor	1 paket	22.969.000,00	Kegiatan penyediaan komp listrik /Penerangan kantor	RSUD AD	Jumlah komponen listrik/ penerangan kantor	-	-	Kegiatan ini dialihkan ke RBA BLUD RS
7		Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	RSUD AD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	27.800.000,00	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	RSUD AD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	Kegiatan ini dialihkan ke RBA BLUD RS
8		Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	RSUD AD	Jumlah porsi makan dan minum rapat dan tamu yang disediakan	Rapat = 1.430 porsi dan Tamu = 673 porsi	27.270.000,00	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	RSUD AD	Jumlah porsi makan dan minum rapat dan tamu yang disediakan	Rapat = 884 porsi dan Tamu = 557 porsi	17.920.000,00	
9		Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	RSUD AD	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	LDDP = 43, LDLP = 8	110.322.000,00	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	RSUD AD	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	LDDP = 22 OH, LDLP = 3 OH	31.500.000,00	

2	Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase peningkatan kinerja sumber daya aparatur	75%	115.000.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase peningkatan kinerja sumber daya aparatur	-	-	
1		Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	RSUD AD	Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bimtek/workshop/sosialisasi di Rumah Sakit	135 orang	115.000.000,00	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	RSUD AD	Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bimtek/workshop/sosialisasi di Rumah Sakit	-	-	Kegiatan ini dialihkan ke RBA BLUD RS
3	Nilai akuntabilitas kinerja rumah sakit	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	78%	649.673.500,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	78%	59.645.650,00	
1		Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	RSUD AD	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	1 unit	478.225.000,00	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	RSUD AD	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	-	-	Kegiatan ini dialihkan ke RBA BLUD RS
2		Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor	RSUD AD	Jumlah peralatan gedung kantor	2 paket	78.321.000,00	Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor	RSUD AD	Jumlah peralatan gedung kantor	-	-	Kegiatan ini dialihkan ke RBA BLUD RS
3		Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	RSUD AD	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	kendaraan roda empat = 5 unit dan kendaraan roda dua = 2 unit	80.627.500,00	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	RSUD AD	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	kendaraan roda empat = 5 unit dan kendaraan roda dua = 2 unit	59.645.650,00	
4		Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	RSUD AD	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	1 Paket	12.500.000,00	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	RSUD AD	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	-	-	Kegiatan ini dialihkan ke RBA BLUD RS
4	Nilai akuntabilitas kinerja rumah sakit	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan peningkatan disiplin aparatur rumah sakit	78%	40.000.000,00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan peningkatan disiplin aparatur rumah sakit	-	-	
1		kegiatan pengadaan penunjuk waktu/ mesin absensi	RSUD AD	Jumlah mesin absensi yang akan diadakan	1 unit	40.000.000,00	kegiatan pengadaan penunjuk waktu/ mesin absensi	RSUD AD	Jumlah mesin absensi yang akan diadakan	-	-	Kegiatan ini dialihkan ke RBA BLUD RS
2		kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	RSUD AD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang akan diadakan	-	-	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	RSUD AD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang akan diadakan	-	-	Kegiatan ini dialihkan ke RBA BLUD RS
5	Nilai akuntabilitas kinerja rumah sakit	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	78%	7.325.000,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	78%	3.131.000,00	
1		Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	RSUD AD	Jumlah dokumen laporan perencanaan, dokumen anggaran dan laporan kinerja perencanaan	9 dokumen dan 51 laporan	7.325.000,00	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	RSUD AD	Jumlah dokumen laporan perencanaan, dokumen anggaran dan laporan kinerja perencanaan	9 dokumen dan 51 laporan	3.131.000,00	

6	Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata		Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	75%	18.427.825.000,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata		Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	75%	9.905.920.000,00	
1		Kegiatan pengadaan kendaraan ambulance/ mobil jenazah	RSUD AD	Jumlah kendaraan ambulance untuk pelayanan rujukan pasien	1 unit	951.400.000,00	Kegiatan pengadaan kendaraan ambulance/ mobil jenazah	RSUD AD	Jumlah kendaraan ambulance untuk pelayanan rujukan pasien	-	-	Kegiatan ini dialihkan ke RBA BLUD RS
2		Kegiatan pembangunan ruang rawat inap RS (VVIP,VIP, Kls I,II,III)	RSUD AD	Jumlah sarana rumah sakit untuk pelayanan pasien rawat inap rumah sakit	1 gedung Radiologi, 3 paket interior kamar Operasi/OK dan KDP 2% gedung OK	13.411.425.000,00	Kegiatan penambahan ruang rawat inap RS (VVIP,VIP, Kls I,II,III)	RSUD AD	Jumlah sarana rumah sakit untuk pelayanan pasien rawat inap rumah sakit	1 paket interior kamar Operasi/MOT OK dan 1 paket pemagaran RS	3.809.350.000,00	
3		Kegiatan pengadaan alat-alat rumah sakit	RSUD AD	Jumlah alat kesehatan/ kedokteran sesuai standar peralatan rumah sakit klas C	4 paket alkes RS	3.885.000.000,00	Kegiatan pengadaan	RSUD AD	Jumlah alat kesehatan/ kedokteran sesuai standar peralatan rumah sakit klas C	4 paket alkes RS	6.096.570.000,00	
4		Kegiatan pengembangan tipe rumah sakit	RSUD AD	Nilai akreditasi rumah sakit	SNARS Paripurna	180.000.000,00	Kegiatan pengembangan tipe rumah sakit	RSUD AD	Nilai akreditasi rumah sakit	-	-	Kegiatan ini dialihkan ke RBA BLUD RS
7	Nilai akuntabilitas kinerja rumah sakit	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata		Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	78%	500.000.000,00	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Mata		Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	-	-	
1		Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala rumah sakit	RSUD AD	Jumlah gedung rumah sakit yang terpelihara	2 gedung	500.000.000,00	Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala rumah sakit	RSUD AD	Jumlah gedung rumah sakit yang terpelihara	-	-	Kegiatan ini dialihkan ke RBA BLUD RS
8	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Persentase kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	82%	1.320.850.000,00	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Persentase kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	82%	827.700.000,00	
1		Kegiatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan para medis	RSUD AD	Jumlah kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit	Mitra RS= 3 dokumen, dr. reversal = 3 org, Pendayagunaan dokter spesialis/WKDS = 3 org	1.045.850.000,00	Kegiatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan para medis	RSUD AD	Jumlah kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit	Mitra RS= 4 dokumen, dr. reversal = 3 org, Pendayagunaan dokter spesialis/WKDS = 2 org	577.700.000,00	
2		Kegiatan kemitraan pengobatan pasien kurang mampu	RSUD AD	Jumlah pengobatan bagi pasien kurang mampu	35 orang	275.000.000,00	Kegiatan kemitraan pengobatan pasien kurang mampu	RSUD AD	Jumlah pengobatan bagi	30 orang	250.000.000,00	
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD RS		Persentase peningkatan mutu pelayanan BLUD rumah sakit	85%	27.652.439.200,00	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD RS		Persentase peningkatan mutu pelayanan BLUD rumah sakit	85%	24.384.867.000,00	
1		Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD rumah sakit	RSUD AD	Jumlah kunjungan pasien yang dilayani di rumah sakit : rawat jalan dan rawat inap	Rawat Jalan = 30.307 org dan Rawat Inap = 5.286 org	27.652.439.200,00	Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan (BLUD)	RSUD AD	Jumlah kunjungan pasien yang dilayani di rumah sakit : rawat jalan dan rawat inap	Rawat Jalan = 28.864 org dan Rawat Inap = 5.035 org	24.384.867.000,00	
2	Nilai akuntabilitas kinerja rumah sakit	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Persentase peningkatan promosi kesehatan yang dilaksanakan	78%	27.500.000,00	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Persentase peningkatan promosi kesehatan yang dilaksanakan	-	-	
		Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	RSUD AD	Jumlah kegiatan promosi kesehatan di RS untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik yang akan dilaksanakan	1 paket	27.500.000,00	Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	RSUD AD	Jumlah kegiatan promosi kesehatan di RS untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik yang akan dilaksanakan	-	-	Kegiatan ini dialihkan ke RBA BLUD RS
10	Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	Program Pembinaan Lingkungan Sosial		Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alkes pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang bersumber dari dana DBHCHT	75%	445.000.000,00	Program Pembinaan Lingkungan Sosial		Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alkes pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang bersumber dari dana DBHCHT	-	-	
1		Kegiatan sarana pelayanan kesehatan	RSUD AD	Jumlah sarana sarana, prasarana dan alkes pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang bersumber dari dana DBHCHT	1 paket alkes RS	445.000.000,00	Kegiatan sarana pelayanan kesehatan	RSUD AD	Jumlah sarana sarana, prasarana dan alkes pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang bersumber dari dana DBHCHT	-	-	Kegiatan ini dialihkan ke RBA BLUD RS
TOTAL ANGGARAN						50.467.735.500,00					35.990.483.650,00	

Adapun hasil perbandingan Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 dengan Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2021 pada Tabel 17 (T-C.31) yang tertuang dalam Renja RSUD dr. Achmad Darwis adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Program yang tertuang pada Rancangan Awal RKPD adalah 10 Program sedangkan pada Hasil Analisa Kebutuhan adalah 6 Program. Hal ini disebabkan karena Program tersebut dialihkan ke RBA BLUD RSUD dr. Achmad Darwis
2. Jumlah Kegiatan yang tertuang pada Rancangan Awal RKPD adalah 27 Kegiatan sedangkan pada Hasil Analisa Kebutuhan adalah 11 Kegiatan. Hal ini disebabkan karena Kegiatan tersebut dialihkan ke RBA BLUD RSUD dr. Achmad Darwis

2.5 Penalaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kebijakan baik oleh kelompok masyarakat, asosiasi, LSM, Perguruan Tinggi dan dari Perangkat Daerah lain di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan Musyawaah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten tidak memuat catatan perubahan untuk BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis.

TABEL 18 (T.C-32)							
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021							
Kabupaten Lima Puluh Kota							
NO	Urusan/ Bidang UrusanPemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan			Besaran/ Volume	Catatan
			Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan		
NIHIL							

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RSUD dr. ACHMAD DARWIS

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional Tahun 2015-2019 adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diseluruh Wilayah Republik Indonesia.

Sedangkan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kesehatan adalah menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien maka yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar didalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus kegiatan, kesehatan dan pembangunan kesehatan.

Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting, yakni :

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care).
2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care).
3. Intervensi Berbasis Resiko Kesehatan (Health Risk).

Adapun sasaranstrategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 adalah :

1. Peningkatan status kesehatan pada setiap kelompok usia.
2. Peningkatan status Gizi.
3. Pengendalian penyakit menular dan penyehatan Lingkungan.
4. Penguatan sistem kesehatan.
5. Peningkatan akses pelayanan kesehatan.

Untuk mencapai Strategi maka Kementerian Kesehatan maka kebijakan program tahun 2015-2019 yaitu :

1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu,anak,remaja, usia kerja dan lanjut usia yang berkualitas.
2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat.
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.
5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas.
6. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan.
7. Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan.
8. Meningkatkan ketersediaan, penyabaran dan mutu sumber daya manusia kesehatan.
9. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Menguatkan manajemen, penelitian, pengembangan dan sistem informasi.
11. Mementapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2021

Tujuan dan sasaran yang ada di RSUD dr. Achmad Darwis sebanyak 2 tujuan dan 4 sasaran yang diuraikan sebagai berikut :

I. Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan sasaran:

1. Terpenuhiya sumber daya rumah sakit.
2. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar.

II. Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola rumah. sakit yang baik, dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit.
2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja rumah sakit.

Tabel 19

Tujuan dan Sasaran RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
1	Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Rata-rata capaian indikator mutu pelayanan	Terpenuhiya sumber daya rumah sakit	Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	75%

			Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standart	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai target	82%
2	Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola rumah sakit yang baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%
			Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja rumah sakit	Nilai akuntabilitas kinerja rumah sakit	78%

Pada tabel diatas terlihat bahwa :

1. Sasaran terpenuhinya sumber daya rumah sakit dengan indikator sasaran persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar yang mana perhitungan dan penjelasannya adalah Rata-rata jumlah komponen sumber daya RSUD dr. Achmad Darwis yang tersedia sesuai standart. Adapun komponen sumber daya RSUD dr. Achmad Darwis terdiri dari :
 - a. Persentase jenis obat yang terpenuhi
 - b. Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai standart.
 - c. Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standart.

$$\frac{\% \text{ jenis obat yang terpenuhi} + \% \text{SDM yang sesuai standar} + \% \text{Ketersediaan Sarpras, Alkes Sesuai Standar}}{3} \times 100$$

2. Sasaran Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standart dengan indikator sasaran Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target yang mana perhitungan dan penjelasannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit merupakan indikator pelayanan

minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Achmad Darwis. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mutu.

3. Sasaran Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mana perhitungannya dan penjelasannya Rata – rata nilai IKM RSUD dr. Achmad Darwis berdasarkan PermenPAN No. 16 Tahun 2014 dan Keputusan Menpan No KEP/25.M.PAN/2/2004. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur melalui survey kepuasan pemakai layanan (responden) pada RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota selaku pelayanan publik, melalui pengisian kuisioner. Kuisioner yang diajukan berisi 14 (empat belas) unsur pelayanan.

Hasil indeks kepuasan masyarakat ini memiliki interval atas 4 (empat) kategori yaitu :

- a. 25 - 43,75 = D / Tidak Baik
- b. 43,76 - 62,50 = C / Kurang Baik
- c. 62,51 - 81,25 = B / Baik
- d. 81,26 - 100 = A / Sangat Baik

4. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja rumah sakit dengan indikator sasaran Nilai akuntabilitas kinerja rumah sakit yang mana perhitungannya dan penjelasannya Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja RSUD dr. Achmad Darwis oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun tujuan dari rencana kerja RSUD tahun 2021 adalah :

1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi rumah sakit.
2. Tersedianya sumber daya manusia sesuai standar kompetensi yang diharapkan dan mencukupi kebutuhan.

3. Tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan rumah sakit baik peralatan kedokteran, peralatan kesehatan, peralatan gedung kantor, gedung laboratorium dan radiologi yang memenuhi standar akreditasi rumah sakit, gedung rekam medis rumah sakit, gedung gizi yang representatif dan sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit dan gedung rawat inap lainnya guna menambah pengembangan pelayanan di rumah sakit.
4. Terlaksananya survey penilaian akreditasi rumah sakit versi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1.1 untuk tahun 2021 dengan lulus paripurna SNARS.
5. Terlaksananya kemitraan dengan FK UNAND, RSUD reveral dokter spesialis dan kerjasama lainnya untuk pelayanan dan penunjang pelayanan rumah sakit.
6. Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan BLUD rumah sakit.
7. Terlaksananya pelayanan bedah sentral yang memenuhi standar akreditasi rumah sakit.
8. Terlaksananya pelayanan terhadap masyarakat miskin yang datang ke rumah sakit pada setiap unit pelayanan.

Sasaran Rencana kerja RSUD tahun 2021 adalah :

1. Meningkatnya Layanan Rumah sakit sesuai standar dan adanya layanan inovatif atau layanan pengembangan.
2. Meningkatnya jumlah tenaga non PNS/Honorer BLUD RSUD dr. Achmad Darwis Kab Lima Puluh Kota untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis, dokter umum, Perawat, Bidan, tenaga Administrasi, sopir, tenaga keamanan/Satpam dan tenaga penunjang lainnya serta terlaksananya pendidikan, pelatihan, Bimtek, workshop, simposium dan sosialisasi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM 75 %.
3. Meningkatnya kualitas dan utilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan rumah sakit baik peralatan kedokteran, peralatan kesehatan, peralatan gedung kantor, kendaraan dinas operasional, kendaraan ambulance untuk kegiatan pelayanan merujuk pasien, gedung laboratorium, gedung radiologi, gedung rekam medis, gedung gizi yang memenuhi standar

akreditasi rumah sakit dan pekarangan tempat parkir serta gedung rawat inap lainnya guna menambah pengembangan pelayanan di rumah sakit.

4. Meningkatnya pelaksanaan akreditasi rumah sakit versi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1.1 untuk tahun 2021 dengan lulus paripurna SNARS.
5. Meningkatnya pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan sesuai standar rumah sakit yang terakreditasi.
6. Meningkatnya penyelenggaraan manajemen Pelayanan Rumah sakit dan SIMRS/sistem Informasi RS.
7. Meningkatnya kemitraan dengan pihak ketiga untuk mendukung operasional pelayanan yaitu dengan FK UNAND, RSUD reveral dokter spesialis dan kerjasama lainnya untuk penunjang pelayanan.
8. Meningkatnya layanan bedah sentral rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi rumah sakit.

Pembangunan gedung kamar operasi RSUD dr. Achmad Darwis pada tahun anggaran 2018 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Gedung kamar operasi terdiri dari 3 (tiga) ruangan kamar bedah yang belum bisa di operasioanlkan karena ruangan kamar bedah tersebut belum terisi baik sarana, prasarana dan alat kesehatannya.

Agar dapat dioperasionalkannya gedung kamar operasi tersebut membutuhkan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Total dana yang dibutuhkan untuk 3 (tiga) ruangan kamar bedah tersebut adalah Rp. 10.500.000.000,00 (Sepuluh milyar lima ratus juta rupiah,-) dengan rincian setiap ruangan kamar bedah membutuhkan anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (3 X Rp. 3.500.000.000,00 = 10.500.000.000,00). Dan di Tahun 2020 telah di anggarkan untuk 1 ruangan Kamar Bedah tersebut, jadi sisa 2 ruangan lagi.

9. Meningkatnya layanan terhadap masyarakat miskin yang datang ke rumah sakit pada setiap unit pelayanan.

Mulai tanggal 1 Januari 2019 tidak diberlakukannya lagi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk peserta BPJS yang memakai rekomendasi SKTM. Kemungkinan masih ada masyarakat miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum memiliki kartu kepesertaan BPJS sehingga masih menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang mana ketika

masyarakat itu berobat ke rumah sakit maka biaya tidak ditanggung oleh BPJS, untuk mengantisipasi hal tersebut maka dibuka kegiatan kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu, kegiatan kemitraan bagi pasien kurang mampu hanya mengakomodir sampai 10 bulan atau sampai bulan Oktober, sehingga untuk bulan atau bulan November dan Desember rumah sakit tidak bias menerima pasien yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Adapun layanan pengembangan yang direncanakan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 20

Rencana Pengembangan Produk layanan RSUD dr. Achmad Darwis

No	KEGIATAN	Pelayanan yang ada	Rencana Pengembangan	Pangsa Pasar Baru
1	Pelayanan Penyakit Dalam	Pelayanan rawat jalan, rawat inap, konsultasi	Pelayanan DM terpadu, pelayanan geriatrik (jantung, paru, penyakit dalam, syaraf dan rehabilitasi), pelayanan Hemodialisa pasien dengan gagal ginjal dan pemeriksaan indoskopi/ gastroskopi pasien dengan ulkus tukak lambung	Pasien DM setiap tingkat, usia lanjut dan pasien dengan gagal ginjal
2	Pelayanan Penyakit Obygn	Pelayanan kesehatan fisik ibu hamil, in partu dan nifas serta tindakan operasi SC dan kasus ginekologi	Pelayanan pelatihan ketrampilan fisik dan psikis dalam masa hamil, partus dan masa nifas Klinik fertility	Pasangan usia subur yang isterinya akan dan sedang hamil
3	Pelayanan Penyakit Anak	Pelayanan rawat jalan, rawat inap,	Pelayanan tumbuh kembang anak Pelayanan NICU	Bayi dan balita bermasalah tumbuh dan

		konsultasi		kembang
4	Pelayanan Penyakit Bedah	Pelayanan rawat jalan, rawat inap, konsultasi	Pelayanan operasi dengan Laparascopy dan operasi cimino untuk pasien HD	Penderita Penyakit Bedah dan pasien untuk tindakan Hemodialisa
5	Pelayanan Penyakit Jantung	Pelayanan rawat jalan, rawat inap, konsultasi	Pelayanan pemeriksaan dengan Ecocardiografi Pelayanan dengan alat treadmill khusus jantung Pelayanan Cateterisasi Laboratorium	Pasien kelainan jantung
6	Pelayanan Penyakit Paru	Pelayanan rawat jalan, rawat inap, konsultasi	Pelayanan khusus paru baik rawat jalan maupun rawat inap yang terpisah dari penyakit lainnya dimulai dari pendaftaran pasien sampai pengambilan obat Pelayanan pemeriksaan Spirometri Pelayanan TB MDR	Pasien penyakit paru
7	Pelayanan Penyakit Syaraf	Pelayanan rawat jalan, rawat inap, konsultasi	Pelayanan kasus geriatik terpadu dgn santun,bermutu, aman, cepat dan terjangkau dimulai dari pendaftaran pasien sampai pengambilan obat	Pelanggan Usia lanjut
8	Pelayanan Penyakit Mata	Pelayanan rawat jalan, rawat inap, konsultasi	Pelayanan katarak dengan Veco dan mikroskop mata	Penderita katarak
9	Pelayanan	Pelayanan	Pelayanan penyakit	Penderita THT

	penyakit THT	rawat jalan, rawat inap, konsultasi	THT	
10	Pelayanan Penyakit Kulit dan Kelamin	Pelayanan rawat jalan, rawat inap, konsultasi	Pelayanan penyakit kulit dan kelamin Pelayanan dengan alat mikrodermabrasi	Penderita penyakit kulit dan Kelamin

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2021 oleh RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Permendagri 13 adalah :

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
 - b. Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - c. Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman.
 - d. Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dgn kegiatan :
 - a. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional.
3. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
4. Program : Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan : Penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, kls I,II,III)
 - b. Kegiatan : Pengadaan alat – alat rumah sakit.
5. Program : Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dgn kegiatan:
 - a. Kegiatan : Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis.
 - b. Kegiatan : Kemitraan pengobatan pasien kurang mampu.
6. Program : Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD rumah sakit

Sedangkan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2021 oleh RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Pemetaan dari Permendagri 13 Tahun 2006 ke Permendagri 90 Tahun 2019 adalah :

1. Program : Administrasi Keuangan:

a. Kegiatan : Administrasi Keuangan

- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

b. Kegiatan : Administrasi Umum

- Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
- Sub Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- Sub Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman.
- Sub Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional.

2. Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

- Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

b. Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit

c. Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan : Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

a. Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
RSUD dr. ACHMAD DARWIS

4.1 Rencana Kinerja OPD tahun 2021 RSUD dr. Achmad Darwis

Rencana Kinerja OPD tahun 2021 berdasarkan IKU OPD RSUD dr. Achmad Darwis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 21.
Rencana Target Kinerja IKU OPD RSUD dr. Achmad Darwis

No	Sasaran	Indikator	Target		Ket
			2021	2022	
1	Terpenuhinya sumber daya rumah sakit	Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	75%	75%	IKU OPD
2	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target	82%	82%	IKU OPD
3	Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%	85%	IKU OPD
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja rumah sakit	Nilai akuntabilitas kinerja rumah sakit	78%	78%	IKU OPD

4.2 Rencana Pendanaan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021

Adapun rincian rencana pendanaan RSUD dr. Achamad Darwis Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22 (T-C. 33)
Rencana Program dan Kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

PERANGKAT DAERAH : RSUD dr. ACHMAD DARWIS

Kode	IKU	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 01 1 0202 01	Nilai akuntabilitas kinerja rumah sakit	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		78%	809.220.000,00			78%	1.134.953.500,00
1 01 1 0202 01 02		Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, rekening air, rekening listrik dan langganan koran/ majalah	RSUD AD	12 bulan	588.000.000,00	DAU	Rutin OPD	12 bulan	732.765.000,00
1 01 1 0202 01 07		Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pembayaran honorarium tim pelaksanaan kegiatan, honorarium tenaga PTTD rumah sakit dan belanja perjalanan dinas dalam daerah	RSUD AD	12 bulan	171.800.000,00	DAU		12 bulan	250.814.300,00
1 01 1 0202 01 17		Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan dan minum rapat dan tamu yang disediakan	RSUD AD	Rapat = 884 porsi dan Tamu = 557 porsi	17.920.000,00	DAU		Rapat = 1.131 porsi dan Tamu = 733 porsi	30.020.000,00
1 01 1 0202 01 18		Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	RSUD AD	LDDP = 22 OH, LDLP = 3 OH	31.500.000,00	DAU		LDDP = 62, LDLP = 10	121.354.200,00
1 01 1 0202 02	Nilai akuntabilitas kinerja rumah sakit	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur		78%	59.645.650,00			78%	88.690.300,00
1 01 1 0202 02 24		Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	RSUD AD	kendaraan roda empat = 5 unit dan kendaraan roda dua = 2 unit	59.645.650,00	DAU	Rutin OPD	kendaraan roda empat = 5 unit dan kendaraan roda dua = 2 unit	88.690.300,00
1 01 1 0202 06	Nilai akuntabilitas kinerja rumah sakit	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		78%	3.131.000,00			78%	8.057.500,00
1 01 1 0202 06 01		Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan perencanaan, dokumen anggaran dan laporan kinerja perencanaan	RSUD AD	9 dokumen dan 51 laporan	3.131.000,00	DAU	IKU OPD	10 dokumen dan 53 laporan	8.057.500,00

1	01	1	02	02	26	Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar		75%	9.905.920.000,00			75%	26.355.496.000,00
1	01	1	02	02	26	04	Kegiatan penambahan ruang rawat inap RS (VVIP, VIP, Kls I,II,III)	Jumlah sarana rumah sakit untuk pelayanan pasien rawat inap rumah sakit	RSUD AD	1 paket interior kamar Operasi/MOT OK dan 1 paket pemagaran RS	3.809.350.000,00	DAU & DAK	IKU OPD	1 gedung rawat inap, 1 gedung Laboratorium, 1 gedung Rekam Medis dan 1 gedung IPS-RS	14.081.996.000,00
1	01	1	02	02	26	18	Kegiatan pengadaan alat-alat rumah sakit	Jumlah alat kesehatan/ kedokteran sesuai standar peralatan rumah sakit klas C	RSUD AD	4 paket alkes RS	6.096.570.000,00	DAU & DAK	IKU OPD	8 paket alkes RS	12.273.500.000,00
1	01	1	02	02	28	Persentase indikator Standar	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		82%	827.700.000,00			82%	1.500.435.000,00
1	01	1	02	02	28	05	Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	Kegiatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan para medis	RSUD AD	Mitra RS= 4 dokumen, dr. reveral = 3 org, Pendayagunaan dokter spesialis/WKDS = 2 org	577.700.000,00	DAU	IKU OPD, SPM	Mitra RS= 5 dokumen, dr. reveral = 4 org, Pendayagunaan dokter spesialis/WKDS = 3 org	1.150.435.000,00
1	01	1	02	02	28	07	Kegiatan kemitraan pengobatan pasien kurang mampu	Jumlah pengobatan bagi pasien kurang mampu	RSUD AD	30 orang	250.000.000,00	DAU	IKU OPD, SPM	40 orang	350.000.000,00
1	01	1	02	02	33	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD RS	Persentase peningkatan mutu pelayanan BLUD rumah sakit		85%	24.384.867.000,00			85%	30.417.683.200,00
1	01	1	02	02	33	01	Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan (BLUD)	Jumlah kunjungan pasien yang dilayani di rumah sakit : rawat jalan dan rawat inap	RSUD AD	Rawat Jalan = 28.864 org dan Rawat Inap = 5.035 org	24.384.867.000,00	BLUD	IKU OPD	Rawat Jalan = 31.216 org dan Rawat Inap = 5.358 org	30.417.683.200,00
TOTAL											35.990.483.650,00				59.505.315.500,00

Tabel 23

Rencana Program dan Kegiatan RSUD dr. Achmad Darwis Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting				
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							54.532.722.262				79.461.777.973	
1 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							19.014.235.262				21.188.163.773	
1 02 01	2,02	Administrasi Keuangan							18.145.369.612				19.964.519.973	
1 02 01	2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tambahan penghasilan	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	181 orang	100 %	18.142.238.612	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	IKU OPD	100 %	19.956.462.473
1 02 01	2,02 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan, dokumen anggaran dan Laporan kinerja perencanaan serta perjalanan dinas dalam daerah (dokumen laporan perencanaan, anggaran) Jumlah dokumen laporan perencanaan, dokumen anggaran dan Laporan kinerja perencanaan serta perjalanan dinas dalam daerah (laporan kinerja perencanaan) Jumlah dokumen laporan perencanaan, dokumen anggaran dan Laporan kinerja perencanaan serta perjalanan dinas dalam daerah (perjalanan dinas dalam daerah)	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 dokumen 51 laporan 17 OH	100 %	3.131.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	IKU OPD	10 dokumen dan 53 laporan	8.057.500
1 02 01	2,03	Administrasi Umum							868.865.650				1.223.643.800	
1 02 01	2,03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran rekening telepon, rekening air, rekening listrik dan langganankoran/ majalah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	588.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Rutin OPD	12 bulan	732.765.000

1	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran honorarium tim pelaksanaan kegiatan, honorarium tenaga PTTD rumah sakit dan belanja perjalanan dinas dalam daerah (belanja perjalanan dinas dalam daerah) Jumlah pembayaran honorarium tim pelaksanaan kegiatan, honorarium tenaga PTTD rumah sakit dan belanja perjalanan dinas dalam daerah (honorarium tenaga PTTD rumah sakit) Jumlah pembayaran honorarium tim pelaksanaan kegiatan, honorarium tenaga PTTD rumah sakit dan belanja perjalanan dinas dalam daerah (honorarium tim pelaksanaan kegiatan)	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	71 OH 13 bulan 12 bulan	100 %	171.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Rutin OPD	belanja perjalanan dinas dalam daerah = 71 OH honorarium tenaga PTTD rumah sakit =13 bulan dan honorarium tim pelaksanaan kegiatan 12 bulan	250.814.300
1	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah porsi makan dan minum rapat dan tamu yang disediakan (Rapat) Jumlah porsi makan dan minum rapat dan tamu yang disediakan (Tamu)	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	884 porsi 557 porsi	100 %	17.920.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Rutin OPD	Rapat = 1.131 porsi dan Tamu = 733 porsi	30.020.000
1	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi (Luar Daerah Dalam Provinsi) Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi (Luar Daerah Luar Provinsi)	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	22 OH 3 OH	100 %	31.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Rutin OPD	LDDP = 62, LDLP = 10	121.354.200
1	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara (roda dua) Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara (roda empat)	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 unit 5 unit	100 %	59.645.650	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Rutin OPD	kendaraan roda empat = 5 unit dan kendaraan roda dua = 2 unit	88.690.300

1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							34.540.787.000			57.123.179.200		
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota							9.905.920.000			26.355.496.000		
1	02	02	2,01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar ; Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) ; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah sarana rumah sakit untuk pelayanan pasien raw at inap rumah sakit (Interior Kamar Operasi/MOT OK) Jumlah sarana rumah sakit untuk pelayanan pasien raw at inap rumah sakit (Pemagaran RS)	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 ; 82 ; 85 %	1 Paket 1 Paket	75 %	3.809.350.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan	IKU OPD	1 gedung raw at inap, 1 gedung Laboratorium , 1 gedung Rekam Medis dan 1 gedung IPS-RS	14.081.996.000
1	02	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar ; Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) ; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah alat kesehatan/ kedokteran sesuai standar peralatan rumah sakit klas C	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 ; 82 ; 85 %	4 Paket	75 %	6.096.570.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan	IKU OPD	8 paket alkes RS	12.273.500.000
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							250.000.000			350.000.000		
1	02	02	2,02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar ; Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) ; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah pengobatan bagi pasien kurang mampu	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 ; 82 ; 85 %	30 orang	82 %	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SPM	40 orang	350.000.000
1	02	02	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							24.384.867.000			30.417.683.200		
1	02	02	2,04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar ; Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) ; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah kunjungan pasien yang dilayani di rumah sakit : raw at jalan dan raw at inap (raw at inap) Jumlah kunjungan pasien yang dilayani di rumah sakit : raw at jalan dan raw at inap (raw at jalan)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 ; 82 ; 85 %	5035 orang 28864 orang	85 %	24.384.867.000	Pendapatan dari BLUD	IKU OPD	Raw at Jalan = 31.216 org dan Raw at Inap = 5.358 org	30.417.683.200

1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						977.700.000			1.150.435.000			
1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						977.700.000			1.150.435.000			
1	02	05	2,01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit (dokter reveral) Jumlah kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit (Mitra RS) Jumlah kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit (Pendayagunaan Dokter Spesialis/ WKDS) Jumlah lembaga yang menerima hibah (PMI)	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	3 orang 4 dokumen 2 orang 1 lembaga	82 %	977.700.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SPM	Mitra RS= 5 dokumen, dr. reveral = 4 org, Pendayagunaan dokter spesialis/WK DS = 3 org	1.150.435.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2021 ini dibuat sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk penyusunan RKPD untuk peningkatan kinerja rumah sakit di tahun 2021.

Dengan dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang kesehatan maka tantangan dan peluang bagi RSUD dr. Achmad Darwis dalam melaksanakan peningkatan mutu layanan dan meningkatkan kinerja layanan dan pemanfaatan layanannya. Tantangan kedepan adalah bagaimana RSUD dr. Achmad Darwis dapat melayani masyarakat sesuai standar pelayanannya dan sekaligus peluang bagi RS untuk meningkatkan kinerja layanannya.

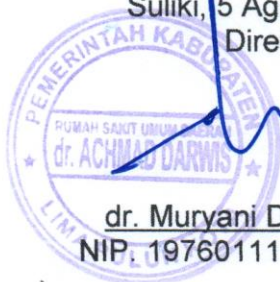
Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu maka setiap perubahan harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan baik. Tahun 2021 ini sesuai dengan target sasaran RS untuk memenuhi persyaratan minimal RS maka direncanakan dan sesuai akreditasi rumah sakit yang Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1.1 maka diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan gedung rawat inap yang memenuhi standar akreditasi, gedung rekam medis yang memenuhi standar akreditasi, Rehabilitasi gedung – gedung pelayanan penunjang seperti Laboratorium, Radiologi, Fisiotherapy yang memenuhi standar akreditasi rumah sakit serta peralatan kedokteran dan alat kesehatan baik medik maupun non medik diusulkan dengan usulan dana DAK bidang kesehatan. Sedangkan dengan dana APBD rumah sakit mengusulkan untuk kegiatan ruangan kamar operasi yang mana untuk gedung kamar operasi telah dibangun pada tahun 2018 dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tetapi belum termasuk interior ruangan kamar operasinya yaitu Modular Operating Theater MOT (Integrated System) untuk 3 kamar OK. Untuk itu di tahun

2021 ini dianggarkan ke dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2021 dengan rincian yaitu : Pemasangan Modular Operating Theater MOT (Integrated System) untuk 3 kamar OK, pemasangan tata udara (Air Conditioning), pemasangan gas medik dan lantai vinyl. Di tahun 2020 telah dianggarkan untuk Pemasangan Modular Operating Theater (MOT) untuk Kamar Operasi, tetapi karena ada Recofusing untuk penanganan COVID-19, maka anggaran tersebut di hilangkan untuk Recofusing Tahun 2020 tersebut. Oleh karena itu kami menganggarkan lagi di TA 2021 agar Gedung Kamar Operasi ini dapat dioperasionalkan dan dimanfaatkan untuk pelayanan bedah di RSUD dr. Achmad Darwis. Sedangkan untuk kegiatan rutin seperti pembayaran listrik, telepon air, honor – honor satker, honor PTTD, makan minum rapat dan tamu rumah sakit, biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah serta pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional rumah sakit, kemitraan untuk dokter reveral, Pendayagunaan dokter spesialis/WKDS dan pasien kurang mampu. Disamping itu juga perlu peningkatan manajemen pelayanan dengan mempersiapkan kegiatan survey akreditasi RS menuju lulus Paripurna SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit) dan pengembangan layanan unggulan atau layanan inovatif.

Dengan pelaksanaan penerapan PPK-BLUD maka diharapkan mutu layanan dapat ditingkatkan. Total anggaran belanja yang dibutuhkan oleh RSUD dr. Achmad darwis untuk tahun 2021 sebesar Rp 54.532.722.262,00 dengan penganggaran penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 18.142.238.612,00, penganggaran/ belanja BLUD tahun 2021 diperkirakan Rp 24.384.867.000,00, dana hibah Palang Merah Indonesia (PMI) sebesar Rp 400.000.000,00 dan usulan dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan RSUD dr. Achmad Darwis sebesar Rp. 6.086.370.000,00. Dengan demikian untuk anggaran tahun 2021 nanti masih dibutuhkan subsidi pemerintah daerah dari APBD atau dari dana alokasi umum (DAU) baik itu untuk opeasional maupun untuk investasi sebesar Rp. 5.519.246.650,00.

Demikian Rencana Kerja RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2021 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja RSUD dr. Achmad Darwis dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang

Suliki, 5 Agustus 2020
Direktur



dr. Muryani Dhatri, M.Kes
NIP. 19760111 200604 2 012



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 285 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 148);

19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

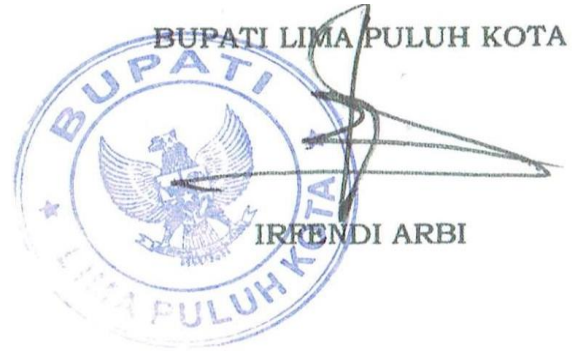
- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas secara umum :
 - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Renja tahun 2021;
 - b. Menyusun dan menyajikan Renja, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan arahan Pengarah melalui Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - c. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT :** Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.
- KELIMA :** Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui DPA

masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 08 November 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 285 TAHUN 2019

TANGGAL : 08 November 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Keuangan	Sekretaris
	Kabag Tata Pemerintahan Umum	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Kerjasama dan Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum Dan Perlengkapan	Anggota
	Kabag Humas Dan Protokoler	Anggota
	Kasubag PP Dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Koordinasi Antar Lembaga	Anggota
	Kasubag Tata Pemerintahan dan Perangkat daerah	Anggota
	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
	Kasubag Peraturan Perundang-undangan	Anggota
	Kasubag Evaluasi dan Dokumentasi Hukum	Anggota
	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota
	Kasubag Kelembagaan	Anggota
	Kasubag Ketatalaksanaan	Anggota
	Kasubag Analisa Jabatan	Anggota
	Kasubag Kerjasama Antar Daerah	Anggota
	Kasubag Kerjasama Pihak Ketiga dan Rantau	Anggota
	Kasubag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Pendampingan dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Sarana Perekonomian	Anggota
	Kasubag Sarana Produksi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Pengembangan Perekonomian dan BUMD	Anggota
	Kasubag Koordinasi Pengembangan SDM	Anggota
	Kasubag Bina Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasubag Kebudayaan dan Keagamaan	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perlengkapan	Anggota
	Kasubag Perbendaharaan dan Akutansi	Anggota
	Kasubag Anggaran	Anggota
	Kasubag Humas dan Pemberitaan	Anggota
	Kasubag Dokumentasi dan Multimedia	Anggota
	Kasubag Protokoler	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	Anggota
	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
	Kasubag Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Persidangan dan Risalah	Anggota
	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	INSPEKTORAT	
	Inspektur	Ketua
	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Auditor Madya	Anggota
	Auditor Muda	Anggota
	Auditor Pertama	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Administrasi dan Umum	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
4.	DINAS KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Kasi Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Kasi Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Kasi Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Kasi PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Kasi Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Kasi Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Kasi Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Kasi Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Kasi Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kabid Trantib	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kabid PPUUD	Anggota
	Kabid SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Kasi Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota
	Kasi Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Kasi Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota	Sekretaris
	Kepala Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi	Anggota
	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan	Anggota
	Kepala Bidang Pengendalian Operasional	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kepala Seksi Bina Pengembangan Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kepala Seksi Bina Keselamatan dan Kebakaran	Anggota
	Kepala Seksi Bina Kualitas dan Personil	Anggota
	Kepala Seksi Peralatan dan Perbengkelan	Anggota
	Kepala Seksi Pengawasan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Anggota
	Kepala Seksi Penyediaan Pergudangan dan Penyaluran	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Seksi Pencarian dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Kesiagaan dan Komunikasi	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Penyuplaian Bahan Pemadam	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
9.	DINAS SOSIAL	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
	Kasi Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Kasi Pendataan Penduduk	Anggota
	Kasi Kelahiran	Anggota
	Kasi Perkawinan dan Perceraian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Kerjasama	Anggota
	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota
	Kasi Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	Anggota
	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota
	Kasi Promosi	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Kasi Data dan Informasi	Anggota
	Kasi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Kasi Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Kasi Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Kasi Metrologi	Anggota
	Kasi Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Kasi Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Kasi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Kasi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Kasi Perizinan dan Data	Anggota
	Kasi Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Kasi Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Kasi Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Infrastruktur TIK	Anggota
	Kabid E-Government	Anggota
	Kabid Statistik, Persandian dan Informasi Publik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Anggota
	Kasi Layanan Hubungan Media	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Media Massa	Anggota
	Kasi Layanan Infrastruktur TIK	Anggota
	Kasi Layanan Manajemen Data Informasi	Anggota
	Kasi Layanan Keamanan Informasi	Anggota
	Kasi Penyelenggaraan Ekosistem TIK	Anggota
	Kasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Kasi Statistik	Anggota
	Kasi Persandian	Anggota
	Kasi Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kasi Promosi dan Informasi	Anggota
	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Kasi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kasi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Kasi Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Kasi Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	DINAS PERHUBUNGAN	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Lalu Lintas	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Kasi Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Kasi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Perumahan	Anggota
	Kasi Kawasan Permukiman	Anggota
	Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
20.	DINAS PERTANIAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	Kepala Dinas Tanhorbun	Ketua
	Sekretaris Tanhorbun	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Aset	Anggota
	Kabid Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Pangan	Anggota
	Kabid Tanaman Hortikultura	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Holtikultura	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Holtikultura	Anggota
	Kabid Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kabid Sarana, Prasarana, Pembiayaan dan Penyuluhan	Anggota
	Kasi Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	Anggota
	Kasi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
21.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Kasi Non Ruminansia	Anggota
	Kasi Kasi Ruminansia	Anggota
	Kasi Perbibitan	Anggota
	Kasi Kesmavet	Anggota
	Kasi Kesehatan Hewan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pakan	Anggota
	Kasi Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Kasi Lahan dan Irigasi	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Metode dan Infomasi	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota
22.	DINAS PERIKANAN	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutiah	Anggota
	Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Mutu Pembudiyaaan Ikan	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Kasi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23.	DINAS PANGAN	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Ketersediaan Pangan	Anggota
	Kasi Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Kasi Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Kasi Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Kasi Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Perpustakaan dan Kearsipan	
	Kasi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
25.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubid Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	Kepala BKPSDM	Ketua
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kasubid Kepangkatan	Anggota
	Kasubid Mutasi	Anggota
	Kasubid Disiplin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubid Status ASN	Anggota
	Kasubid Informasi ASN	Anggota
	Kasubid Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
27.	BADAN KEUANGAN	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Daerah	
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Penyusunan Program	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubid Bina Ideologi	Anggota
	Kasubid Bina Wasbang	Anggota
	Kasubid Bintang, Eksosbud Dan Agama	Anggota
	Kasubid Penanganan Konflik dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kasubid Bina Potensi Satuan LINMAS	Anggota
	Kasubid Pengarahan dan Pengendalian Satuan LINMAS	Anggota
	Kasubid Hal Dan Fasilitasi Pemilu	Anggota
	Kasubid Fasilitasi Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan	Anggota
	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
	Kasi Kedaruratan	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Rehabilitasi	Anggota
	Kasi Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
43.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Sekretaris RSUD dr. Achmad Darwis	Sekretaris
	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dan Promosi	Anggota
	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang	Anggota
	Kasi Pelayanan Promosi	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Perawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Pelaksana pada RSUD Achmad Darwis	Anggota
30.	KECAMATAN GUGUAK	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
31.	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
32.	KECAMATAN MUNGKA	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
33.	KECAMATAN SULIKI	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
34.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota
35.	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
36.	KECAMATAN LUAK	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
37.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
38.	KECAMATAN HARAU	
	Camat Harau	Ketua

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
39.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
	Camat Situjuh Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuh Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Anggota
40.	KECAMATAN AKABILURU	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
41.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
42.	KECAMATAN KAPUR IX	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 08 November 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA



IRFENDI ARBI